





Senin - Jumat 06.00 s.d. 18.00

### Lingkup Layanan:

Informasi Gratifikasi, Informasi LHKPN, Informasi Publik dan Informasi Pengaduan Masyarakat





FOTO COVER Kerja Keras **Merawat Indonesia** Photo: integrito/KPK



**JEJAK KASUS 28 PERUSAHAAN JADI PESAKITAN** 

### **KANAL**

MENDORONG PEMUDA MENJADI JURNALIS WARGA

### **UTAMA**

MERAMU RESEP INTEGRITAS

### **MOZAIK**

BERPIKIR KRITIS DENGAN LENSA KAMERA

### **TATAP MUKA**

KORUPSI MENGANCAM PERADABAN

### **PERINTIS**

SANG PENGAWAS PERENCANAAN ANGGARAN"

### **KHUSUS**

KERJA KERAS MERAWAT INDONESIA

**AKU KPK** 

MENITIP HARAPAN PADA KOIN RECEH **CAKRAWALA** 

### **HUKUM BERAT**

"PARA PENGERAT"

### **PARENTING**

JALAN PANJANG MEMBENTUK KARAKTER ANAK

CERMAT SIKAPI HOAKS

**TELADAN** 

### **BJ Habibie**

SI CERDAS YANG MEWARISI PESAWAT

### WARGA NET







### @HPuhobotot

buat KPK smga ttp smangat dlm mmberantas korupsi agar kemerdekaan dpt di maknai

### @Tano\_Maske

Sejatinya Kekuatan KPK itu ada pada orang2 KPK itu sendiri. Tetap Semangat dan teruslah berjuang mengabdi hanya kepada tuhan yg maha esa, bangsa dan negara. Bravo.. KPK.

### @ligaarief\_r

Terus berjuang untuk orang2 di kpk. Saya, rakyat kecil hanya bisa mendoakan kesehatan dan keselamatan anda2 semua....:)

### @GpKrisna

Terus bangun anti korupsi untuk indonesia sejahtera

### @Sugi71879614

Hidup kpk!!! Harus independen!! Rakyat mendukung KPK sepenuhnya!!! Semangat kerja nya yaa!!

### @@isatriawa

kalo ada upaya melemahkan kpk itu sama saja dengan membiarkan koruptor semakin kuat dan meraja lela.....upaya pembetantasan Korupsi itu harus kuat jika perlu terapkan hukuman yg seberat beratnya buat para pelaku koruptor

### @gue\_asep

Jangan kasih kesempatan buat orang mencoba mencari celah untuk membuat kebenaran dari kesalahan. KPK HARUS TETAP SEMANGAT!

### integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Yuyuk Andriati Iskak; Redaktur Pelaksana: Lufti Avianto; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Frietz Calvin Madayanto, Siti Sharatassyah. Kontributor: Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; Desain & Layout & Grafis: Guruh Suliano Putra, Iman Santoso; Periset Data: Sicilia Julianty Hutabarat; Fotografer: Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Sicilia Julianty Hutabarat , Sheto Risky Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@KPK.go.id; Website: www.KPK.go.id; Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK\_RI; Instagram: @official.KPK; Youtube: KPK RI

### PAHLAWAN BARU

etika kita membicarakan tentang kepahlawanan, mungkin yang terlintas adalah keberanian dan pengorbanan sebab begitu cintanya terhadap tanah air. Dengan begitu, akan terbayang wajah-wajah Bung Tomo, Jenderal Besar Sudirman, Bung Hatta, juga ribuan pejuang lainnya, yang bisa jadi belum kita ketahui.

Dalam situasi perjuangan melawan penjajah, para pahlawan berkorban membangun bangsa ini dari nol. Mereka merebut kemerdekaan dengan keringat, darah dan air mata. Dari pribadi pahlawan itulah bersemi nilai-nilai yang kita sebut dengan integritas.

Kini kemerdekaan telah diraih. Keberlanjutan menjaga dan mengisi kemerdekaan ada di tangan generasi hari ini. Musuh pun berganti. Penjajahan berganti rupa menjadi korupsi dengan berbagai modus yang menyusup ke banyak sendi kehidupan.

Kita kerap terperanjat melihat 'musuh' itu ada di mana-mana. Pada pembangunan infrastruktur jalan, ia kerap hadir dalam bentuk takaran-takaran aspal dan semen yang berkurang. Dalam pengadaan barang dan jasa, ia dikenal dengan penggelembungan harga, atau kongkalikong kickback antara vendor dan pejabat pembuat komitmen. Ia menjangkiti du-

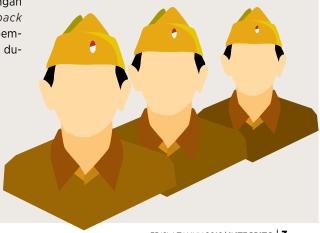
nia kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi dan sosial kemanusiaan.

Karena musuh-musuh itu berjumlah banyak dan menyerang secara masif, maka sudah saatnya kita mengisi perjuangan membangun bangsa ini dengan menjadi pahlawan berikutnya. Meneruskan perjuangan memerdekakan bangsa dari jeratan korupsi, dengan menegakkan nilai integritas dari dalam diri. Selain keberanian dan pengorbanan, nilai integritas juga mencerminkan nilai kejujuran, kesederhanaan, peduli, adil, mandiri, tanggung jawab, dan kerja keras.

Maka tak heran, kita akan menjumpai pahlawan baru hari ini dalam wujud seorang pramukantor yang mengembalikan sekantung uang yang ia temukan. Juga bisa berwujud seorang pelajar SMA yang menolak kecurangan masif pada ujian nasional. Atau para pengendara motor yang tertib berlalu lintas, meski kesempatan terbuka untuk melanggar itu semua.

Dia bisa siapa saja dan berprofesi apa saja. Pahlawan itu bisa jadi keluarga dan kerabat kita, sahabat, tetangga, atau bahkan diri kita sendiri.

Semoga.



2 | INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 | EDISI 4 TAHUN





# MENDORONG PEMUDA MENJADI JURNALIS WARGA

"Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." -Bung Karno.

Malan pelatihan Jurnalisme Warga Antikorupsi di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat. Para peserta yang lolos seleksi mengikuti kegiatan selama tiga hari di Desa Wisata Kubu Gadang, Padang Panjang pada 3-5 Agustus 2019.

Para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang ini, diharapkan dapat menyerap ilmu yang diberikan para mentor profesional dan mengaplikasikannya dalam laporan jurnalisme warga. Selama tiga hari, para peserta dibekali dengan nilai antikorupsi yang berasal dari budaya dan adat istiadat ranah Minang.

Pembekalan sejarah dan budaya Minang disampaikan dosen Universitas Andalas Prof. Gusti Asnan, serta budayawan S. Matron Masdison. Selanjutnya, para peserta juga mengikuti jamuan adat makan *baradaik*, menyaksikan pertunjukan *silek lanyah*, mengunjungi pasar digital, hingga mengikuti jamuan makan *bajamba*.

Tak hanya itu, mereka juga didorong untuk melakukan praktik peliputan dan melakukan proses produksi hingga menjadi artikel, video, serta audio yang bernilai berita dan menginspirasi banyak orang.

Tak hanya para peserta workshop yang berusia relatif muda, Desa Wisata Kubu Gadang juga dikelola para pemuda desa setempat. Mereka melakukan banyak terobosan untuk meningkatkan potensi desa menjadi desa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Desa ini, kini menjadi suatu kebanggan bagi warganya, karena bukan hanya wisatawan lokal saja yang berkunjung, namun juga dari mancanegara," kata Yuliza Zen, salah satu pengelola Desa Wisata Kubu Gadang.

SIMAK TERUS CERITA-CERITA INSPIRATIF LAINNYA DALAM KANAL ANAK, SETIAP JUMAT JAM 10 PAGI HANYA DI KANAL.KPK.GO.ID



# MERAMU RESEP INTEGRITAS

TEMUAN PERMASALAHAN INTEGRITAS INSTANSI DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH BERKUTAT PADA PERKARA CALO, NEPOTISME, GRATIFIKASI DAN SUAP. MESKI HASIL SURVEI INTEGRITAS MENYIRATKAN KABAR BAIK, PERLU KOMITMEN LEBIH AGAR INSTANSI LEMBAGA MAMPU MERUMUSKAN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI YANG EFEKTIF.

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi penelitian dan pengembangan meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (1/10) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setidaknya ada 26 perwakilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) mengikuti rangkaian survei.

Ada beberapa temuan penting dari hasil SPI 2018 yang bisa dikatakan positif. Di antaranya, nilai indeks integritas tertinggi diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan nilai 78,26. Sementara terendah Mahkamah Agung (MA) dengan indeks integritas 61,11. Pada kategori Pemerintah Daerah (Pemda), Provinsi Riau mendapat skor terendah dengan nilai 62,33. Sementara di tingkat kementerian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meraih angka tertinggi dengan nilai 74,75. Sementara Polri dan Pemprov Sulawesi Tengah tidak bisa dinilai karena kekurangan sampel.



Angka-angka itu tidak muncul begitu saja. Setidaknya, ada tiga aspek krusial yang ikut menjadi pertimbangan. Di antaranya budaya organisasi, sistem pencegahan antikorupsi, pengelolaan SDM dan anggaran. Secara rinci, aspek budaya organisasi mencakup kejadian suap, gratifikasi dan keberadaan calo. Aspek sistem antikorupsi mencakup sosialisasi antikorupsi dan pengaduan pelaku korupsi. Sementara aspek pengelolaan SDM mencakup nepotisme penerimaan pegawai dan promosi jabatan. Terakhir, aspek pengelolaan anggaran mencakup perjalanan dinas atau honor fiktif.

Menurut hasil survei, ada 22% responden internal lembaga mengaku pernah mendengar atau melihat calo. Angka ini meningkat dari 2017, dimana hanya ada 17%. Sementara sekitar 25% responden internal pernah melihat atau mendengar nepotisme dalam penerimaan pegawai. Meningkat dari tahun 2017 yang hanya 20%.

Berikutnya, ada sekitar 5,6% responden internal mengaku pernah mendengar atau melihat praktik suap promosi jabatan. Pada 2017 lalu, angkanya hanya 4%. Tak hanya itu, 21% responden internal yakin betuk kalau suap/gratifikasi berpengaruh pada kebijakan karier. Temuan



Perkuat BUMN-Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam paparannya di depan perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penguatan Integritas di lingkungan

"Sinkron atau tidak?
Kalau nilai MCP-nya tinggi
tapi nilai SPI rendah, bisa
jadi administrasinya baik,
tetapi pelaksanaannya
belum baik."

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK

lainnya, 2 dari 10 pegawai melihat pelapor praktik korupsi di unit kerja justru dikucilkan, diberi sanksi atau kariernya terhambat dalam 12 bulan terakhir. Kemudian 25% responden pengguna layanan mengaku melihat atau mendengar pegawai menerima suap. Angka ini turun dari 2017 yang mencapai 30%. Sementara 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak percaya melaporkan korupsi mendapat perlindungan.

Direktur Peneliteian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana menyebut, ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang rata-rata indeks nilai K/L/PD mencapai 66. Angkaangka dalam survei, lanjut dia, semestinya menjadi motivasi bagi tiap-tiap instansi pemerintah untuk meningkat-

kan integritas mereka ke depan. "Sekarang, rata-rata 68,75. Ada peningkatan dibanding tahun lalu," katanya.

Tren peningkatan ini terbilang baik, karena, lanjut Wawan, pada 2021 mendatang ditargetkan 542 kabupaten/kota/provinsi akan ikut survei. Begitu pula dengan 86 kementerian dan lembaga. Jika nanti saatnya semua kementerian dan lembaga mengikuti survei, ia yakin ke depan bisa menjadi indeks skala nasional.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai survei yang dilakukan pada Juli 2017 – Juli 2018 diharapkan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi secara keseluruhan sehingga bisa diintegrasikan dengan capaian monitoring center for prevention (MCP) koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).

"Sinkron atau tidak? Kalau nilai MCP-nya tinggi tapi nilai SPI rendah, bisa jadi administrasinya baik, tetapi pelaksanaannya belum baik," ungkapnya. Alex menambahkan, hasil survei ini diharapkan dapat ditindaklanjuti K/L/PD dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. •



**SPI** adalah survei pemetaan kondisi integritas dan risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD)

Sejak 12 tahun lalu, SPI mendasarkan survei pada metode Anti-Corruption and Civil Rights Commision (ACRC) Korea Selatan. Direkomendasikan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Metode penilaian telah diterapkan luas di beberapa negara dengan nama integrity assesment, dan diakui internasional.

Ke depan, SPI dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi prioritas nasional, Pemda wajib menganggarkan kegiatan ini sesuai Permendagri No. 33 / 2019.

Apa itu SPI?

### **Tahukah anda?**

Semakin tinggi angka indeks, menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik.

Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik.

Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekali pun.

Sumber: SPI 2018, KPK (2019)

12 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019



### KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

## JURUS BLOKADE KORUPSI KEMENTERIAN

PENCEGAHAN KORUPSI DI LEMBAGA DAN KEMENTERIAN BUTUH SISTEM PENGAWASAN YANG BAIK. PENGUATAN WHISTLE BLOWER SYSTEM DAN KETERBUKAAN MEKANISME PELAPORAN DIYAKINI MAMPU MENCEGAH LEBIH EFEKTIF.

elain sebagai tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, rekam jejak Mohammad Hatta sebagai sosok antikorupsi sudah tidak asing lagi bagi bangsa ini. Berbagai cerita mengenai pandangannya akan antikorupsi punya peran penting dalam perjalanan Indonesia memerangi korupsi.

Salah satu kisah inspiratif, di antaranya pada 1970 ketika Bung Hatta, begitu ia disapa, mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya (kini Papua). Di daerah ini, ia sempat dibuang dan diasingkan kolonial Belanda.

Seusai berkunjung, ia kemudian disodori sebuah amplop berisi uang yang merupakan bagian dari biaya perjalanannya yang ditanggung pemerintah. Namun, sontak Bung Hatta menolaknya.

"Uang apalagi? Bukankah ongkos perjalanan sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah bersyukur," kata dia. Penolakan itu bukan tanpa sebab. Bagi Bung Hatta, uang pemerintah sebenarnya adalah uang rakyat. Atas dasar itu ia menolaknya. "Kembalikan," ungkap bung Hatta seperti dikutip

dari buku berjudul Mengenang Bung Hatta karya Iding Wangsa Widjaja.

Semangat itulah yang kini menjadi inspirasi banyak pihak untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 yang belum lama diluncurkan KPK, tergambar upaya signifikan sejumlah kementerian dan lembaga meminimalisasi peluang korupsi di internal kelembagannya. Sebagian di antara mereka, dengan program-programnya berhasil meraih skor tertinggi. Di kategori kementerian misalnya, Kementerian Kesehatan berhasil meraih skor tertinggi dengan nilai 74,75.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami menyebut semangat memberantas korupsi bisa berjalan karena konsisten dalam menjalankan mekanisme pengawasan. Sikap Bung Hatta yang peka bagaimana mengelola uang negara sudah seharusnya ditiru.

Di Kementerian Kesehatan menurutnya sudah terbilang baik dalam membangun dan menjalankan Whistle Blowing System (WBS). Jika ada PNS internal melihat ada gelagat upaya penerimaan suap/gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang jabatan demi memperkaya diri, ada skema

pelaporan di lingkungan satuan kerja (satker). Langkah berikutnya, dilakukan pembinaan. Di lingkungan satker, mekanisme pelaporan masih manual. Sementara di tingkat kementerian sudah dalam bentuk aplikasi dan terintegrasi dengan KPK sejak 2017.

"Ini memacu kami," ungkapnya.

Karena sistem sudah berjalan, mayoritas pegawai di internal sudah menyadari kalau upaya pemberian itu harus dilaporkan. Pemberian sekecil apapun, harus sangat terbuka. Di unit satuan kerja saja misalnya, ada unit khusus pengendali gratifikasi. Sementara induknya di inspektorat jenderal.

Terus terang, kata dia, Kemenkes berusaha optimistis dalam melakukan perbaikan bernapas antikorupsi, membuat lembaganya bisa tetap menjalankan program dengan baik. Baginya, hasil ini merupakan kerja bersama semua manajemen di Kementerian Kesehatan.

"Selalu berupaya optimal di semuanya. Walaupun kami sadari masih ada kekurangan kami akan terus perbaiki itu," katanya.

Kekurangannya, lanjut dia, dilihat dari masih minimnya registrasi alat kesehatan dan obat-obatan dan pelayanan rumah sa-



Dibimbing - Tim Litbang KPK membimbing dan menjelaskan terkait proses penilaian SPI yang dilakukan oleh KPK.

kit. Kemenkes juga memiliki layanan teknis di rumah sakit yang cukup banyak yang harus diselaraskan. Dan itu, menurutnya tidak mudah. Meski begitu, pihaknya tidak berhenti dan terus membangun sistem yang lebih baik.

"KPK memberi *feedback* yang harus diperbaiki dan diselesaikan. Menurut kami ini bagus sekali," ungkapnya.

### Tiga Lapis Pertahanan

Berbeda dengan Kemenkes yang mengandalkan skema WBS, Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai) yang berhasil mencatatkan nama lembaganya sebagai peraih nilai kedua dalam kategori kementerian dengan skor 70,02 punya jurus berbeda.

Inspektorat Kemenkeu Bambang Ka-

### "Orang yang berani ngomong dan berani lapor harus kita hargai."

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK

ruliawasto menyebut pihaknya melakukan pembenahan. Salah satunya, dengan mengadopsi skema tiga lapis pertahanan (three line of defence) untuk pengendalian internal yang efektif. Tiga unsur itu antara lain Unit Operasional (manajemen) yang menerapkan



pengendalian intern sepanjang waktu, Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang bertugas membantu manajemen pada setiap level organisasi, dan Inspektorat Jenderal (internal audit) yang memberikan asuransi dan konsultasi penerapan pengendalian intern. "KPK yang menilai bagus, ya kita bersyukur," katanya.

Di sisi lain, Kemenkeu juga melakukan penilaian mandiri seperti SPI, dengan model yang serupa dengan yang digunakan KPK. Di Kemenkeu juga menggunakan nama SPI, dengan 14 ribu responden. Sebanyak 50 persen berasal dari internal, sisanya dari eksternal. Hasilnya disampaikan ke Menteri, kemudian semua eselon 1 menindaklanjuti. Tahun ini, targetnya bisa sampai 20 ribu responden agar mewakili seluruh pegawai.

"Jika KPK tahun depan menggunakan online, nah kita sudah," ungkapnya.

Ia mengaku bersyukur, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi contoh yang baik terkait integritas. Untuk promosi jabatan saja misalnya, harus ada *clearance* terlebih dahulu dari inspektorat bidang investigasi. Termasuk, perilaku di medsos yang menangkap *digital foot print* yang menjadi salah satu syarat promosi mulai dari eselon 3.

### Bersikap Terbuka

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, KPK mendorong agar setiap lembaga baik pusat maupun daerah membangun WBS. Pasalnya, 80% kasus penyimpangan termasuk korupsi itu bisa terungkap karena peran pelapor WBS. Nah, untuk bisa menciptakan WBS yang efektif tidak ada cara lain kecuali membuka diri terhadap pelapor.

"Banyak yang mendapat informasi, saya juga, dari BUMN atau Pemda yang melaporkan. Tetapi, ketika saya minta melapor secara resmi banyak yang ketakutan," ungkapnya.

Ketakutan itu lebih kepada kekhawatiran akan identitasnya yang terungkap. Jika terjadi, banyak yang mengkhawatirkan kariernya. Baik dimutasi, atau bahkan di-nonjob-kan. Baginya, ini bukan iklim yang baik untuk terciptnya WBS yang terpercaya. WBS yang baik harus punya keberanian membuka siapa orangnya, sampaikan dan laporkan. Bahkan meskipun ketika laporan itu tidak benar, yang bersangkutan harus dilindungi.

"Orang yang berani *ngomong* dan berani lapor harus kita hargai," tegasnya.

Unsur Whistle Blowing System (WBS)

Melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai pelapor Pelapor dirahasiakan dan dilindungi

WBS dilaksanakan dengan efektif, transparan dan bertanggung jawab semua pihak untuk menangani penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi

Perlu komitmen

Ada tindak lanjut dan *feedback* terhadap laporan yang disampaikan Dikelola unit yang independen

alur pelaporan bebas dan rahasia Perlu pemantauan dan tindaklanjut

Perlu *review* dan sosialisasi kelanjutan



### PEMDA JATENG DAN JATIM

### TAK BERHENTI BERINOVASI

JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR RAIH SKOR TERTINGGI SURVEI INTEGRITAS LEMBAGA ANTIRASUAH. FAKTOR PENGAWASAN MANDIRI MASYARAKAT, TEROBOSAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PROGRAM TERINTEGRASI MENJADI KUNCI.

aya tidak *nyangka*. Tahu-tahu *kok* dipanggil mendapat prestasi terbaik nasional terkait Survei penilaian integritas," ucap Wadyo Basuki, Sekretaris Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat mengungkapkan kegembiraannya.

Ekspresi bahagia Wadyo tidak terlepas dari keluarnya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil Survei yang diselenggarakan di 20 pemerintah provinsi dan enam kementerian/lembaga secara umum menyebut Pemprov Jawa Tengah mendapat skor integritas tertinggi dengan nilai 78,26.

Meski mengaku terkejut, Wadyo merasa tidak ada yang istimewa hingga Pemprov Jateng mendapat nilai tertinggi. Sekadar menjalankan ketentuan yang berlaku. Termasuk, imbauan dari pimpinan KPK terkait antikorupsi.

"Tapi memang sudah melakukan banyak hal," ungkap Wadyo. Di antaranya, mendorong pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat hingga anak

didik di semua level pendidikan sekolah.

Terdengar sederhana memang. Tapi, lanjutnya, itu semua tidak lepas dari komitmen Gubernur Jawa Tengah terhadap semangat antikorupsi. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi menjadi buktinya. Perda dan implementasinya berlaku umum dan mulai berjalan. Selain itu, Pemprov Jateng rajin berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum.

Salah satu koordinasi di antaranya membentuk tim saber pungli. Selain bertugas monitoring, juga aktif membuka komunikasi dengan masyarakat terkait antikorupsi, praktik pungli, dan sebagainya.

"Kami bekerja dalam sistem yang terkoordinasi, meskipun ada kekurangan," ungkapnya.

### **Pemimpin Contoh Terbaik**

Senada dengan Wadyo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan keberhasilan Jateng meraih skor tertinggi karena program digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat. Langkah yang diambilnya sebagai bagian dari mitigasi korupsi, sejak menjabat gubernur pada 2013.

"Saya melakukan pembenahan sistem pemerintahan ke digitalisasi dengan menerapkan *e-government, e-budgeting,* pengelolaan gratifikasi, pelaporan harta (LHKPN) ke KPK serta pelayanan masyarakat melalui media sosial," katanya kepada wartawan, Oktober lalu.

Lebih lanjut, Ganjar, menyatakan untuk menghindari jual-beli jabatan, Pemprov Jateng melaksanakan lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka bisa diikuti semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan. Nah, ketika digitalisasi sistem berjalan, langkah berikutnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan kerja Pemprov Jateng. Karena itulah jangan heran, Ganjar yang aktif di media sosial pun mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov

Jateng memiliki akun media sosial dalam setiap pelaporan kegiatan mereka.

"Banyak laporan dari masyarakat tentang kinerja ASN, seperti pungutan liar. Bila terbukti laporan tersebut benar, pegawai yang bersangkutan saya pecat," tegasnya.

Baginya, gerakan antikorupsi yang paling mendasar adalah pemimpin memberikan contoh kepada anak buahnya dengan tidak melakukan korupsi. Jika atasan punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem dengan memberi contoh terbaik, ia yakin betul orang pasti takut menyuap.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegakan, SPI merupakan bagian dari kegiatan pencegahan KPK yang ditujukan guna membantu memperkuat perencanaan dan kegiatan antikorupsi. Baik itu di kementerian, pemerintah daerah maupun KPK sendiri.

"Supaya bapak/ibu punya acuan, titik lemah pemberantasan korupsi itu di mana. Supaya ada perbaikan," ungkapnya.

"Gerakan anti-korupsi yang paling mendasar adalah pemimpin memberikan contoh kepada anak buahnya dengan tidak melakukan korupsi."

**Ganjar Pranowo** 



Keberhasilan pemberantasan korupsi menurutnya bukan berdasarkan pada banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau banyaknya orang yang dipenjarakan. Justru yang terpenting jika yang muncul di pemberitaan itu tentang perbaikan tata kelola, mengutamakan penyelamatan negara atau keuangan daerah.

### **Kekurangan Auditor**

Menjadi salah satu Pemda dengan raihan skor tertinggi dalam survei integritas KPK tidak membuat Pemprov Jawa Timur (Jatim) jumawa. Meski sudah kedua kalinya menerima salah satu skor tertinggi – sebelumnya peringkat pertama – dengan skoring kedua terbaik di bawah Jateng, Pemprov Jatim terus berbenah diri.

"Kami berbenah, mulai dari MCP, dana desa, *whistle blower*, sudah sangat *ready*," ungkap Inspektur Pemprov Jawa Timur Helmy Perdana.

Untuk whistle blower system misalnya, sudah ada sistem yang berlandaskan peraturan gubernur (Pergub) yang terbit 2017. Di sisi lain, ada inovasi baru bernama Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) yang diapresiasi KPK. Dana desa juga mendapat apresiasi Presiden, di mana Jawa Timur termasuk yang terbaik penyerapannya melalui program klinik desa.

Meski begitu diakuinya ada kendala jumlah auditor, sekitar 40 orang. Dengan entitas 300–400, satu auditor harus menangani 7-10 entitas. "Kami kejar tayang," ungkapnya. Sejauh ini permintaan tambahan belum terealisasi. Maka, yang bisa dilakukan yakni mengubah sistem dari audit yang butuh banyak tim, menjadi skema coaching clinic. Tim sedikit, tapi bekerja optimal.

Cara bekerja tim yakni datang sebagai mitra/konsultan, bukan sebagai pemeriksa. Efeknya positif, karena entitas tidak merasa diperiksa sehingga lebih terbuka. Dengan skema ini ada *transfer knowledge* yang terjadi. *Coaching clinic* ini satu-satunya di Indonesia. Perlu diketahui ketika tim *coaching clinic* datang, objek yang diper

**Integritas** 9. DKI Jakarta: 68,45 **Tertinggi** 5. Kep. Riau: 73,34 1. Jawa Tengah: 78,26 4. Gorontalo: 73,85 8. Kalimantan Selatan: 68,76 3. Sumatera Barat: 74,63 6. NTB: 73,13° \_\_ 10. NTT : 7. Jawa Barat: 2. Jawa Timur : 74.96 72,13 Sumber: SPI KPK, 2019

riksa tidak boleh menyediakan apapun.

"Sama dengan KPK, jadi hanya menyediakan tempat."

Sementara soal whistle blower system, Pergub mengamanahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus punya unit penanganan pengaduan (UPP), jadi semua permasalahan itu tidak boleh langsung keluar, harus di-tackle dulu oleh UPP. Kalau pada level UPP sudah tidak bisa selesai, baru dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Whistle blower system pada level inspektorat provinsi itu, lanjut Helmy, berbeda dengan yang lain. Ketika tim inspektorat melakukan pemeriksaan pada objek audit, setelah selesai diperiksa, akan diberikan questioner kepada objek yang diperiksa.

"Silakan dinilai bagaimana perilaku

yang memeriksa selama melakukan pemeriksaan, apakah disiplin? Apakah ada meminta sesuatu? Silahkan ditulis nanti questioner ini bersifat rahasia, dan harus dikembalikan ke saya langsung, tanpa nama," jelasnya. Jika ada auditor yang ketahun meminta fasilitas, maka ia akan tegas mencopotnya dari jabatan fungsional.

Inovasi lain di Jawa Timur yang bisa menggambarkan upaya pencegahan korupsi adalah inovasi di sektor layanan publik. *Drive thru* Samsat misalnya yang dilakukan sejak 2015. Kemudian inovasi dari lingkungan yang kurang dari segi pengawasan. Umumnya, lanjut Helmy, orang jika dihadapkan pada pengawasan akan sulit berinovasi. Tapi Jatim berbeda,

karena meskipun konsepnya mengawasi, inovasi tetap terus ada.

Skor

"Ini juga menjadi salah satu penilaian KPK, karena peduli, tidak ada pengaturan di pemerintahan tapi kami peduli, ini yang menjadi penilaian tertinggi kami, integritasnya tinggi, kami peduli masalah korupsi," jelasnya.

Ke depan, pihaknya mengaku akan mempertahankan program yang ada dengan peningkatan kerja sama kabupaten/kota. Di daerah, katanya, kabupaten/kota ada yang memiliki inspektorat. Ketika dicanangkan program di suatu kabupaten, artinya tidak selesai begitu saja. Harus dilanjutkan. Dari hasil survei ini ia mengaku mendapat rekomendasi agar mendatangkan tenaga ahli.

20 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 21



**Hadiah** - Wakil Ketua KPK memberikan hadiah kepada pegawai KPK yang bertanya paling baik.

# BERBAGI ILMU LEWAT KOMEN DAY

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN, MENEMPEL PADA MASING-MASING INDIVIDU. PERLU WADAH, AGAR IA BISA DIBAGI DAN DIPELAJARI.

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejumlah tugas dalam pemberantasan korupsi. Tugas utama di bidang penindakan, pencegahan serta koordinasi dan supervisi, didukung oleh sejumlah peran lain seperti bidang keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, hingga advokasi.

Pada setiap bidang, tentu saja ada data, informasi dan pengetahuan yang berguna, tidak hanya bagi pegawai di unit kerja tersebut, melainkan bagi pegawai lainnya. Ini dilakukan sebagai bentuk proses pembelajaran bagi insan KPK.

Bagi Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi Dian Novianthi, pengetahuan menjadi aset berharga bagi lembaga antirasuah ini. Karenanya, hal itu perlu dihimpun, didokumentasikan dan dibagikan ke pegawai lainnya.

"Masing-masing pegawai kita melakukan pekerjaannya dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan. Tapi pengetahuan ini ada di masing-masing kepala kita sendiri, di laptop maupun di buku catatan kita sendiri."

Pada era informasi seperti saat ini, Dian berpendapat bahwa KPK harus memiliki sebuah strategi untuk mengelola informasi di lingkungan internal. Untuk itu, Pusat Edukasi Antikorupsi membuat sebuah program diskusi bulanan untuk seluruh pegawai KPK dalam kegiatan Knowlegde Management Day atau KoMen Day.

Lewat program ini, setiap pegawai bisa berbagi ilmu mengenai pekerjaannya, kesulitan yang dihadapi serta trik jitu untuk memecahkan masalah terkait pekerjaannya.

"Setiap orang yang menjadi narasumber akan mendefinisikan apa yang ia kerjakan supaya unit lain mengetahui."

Bagi Dian, hal itu juga dapat membuka peluang masuknya ide-ide segar dari unit lain.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengimbau setiap pegawai bisa membagi ilmunya dengan unit lain.

"Ilmu-ilmu tersembunyi pada orangorang tertentu yang mendalami hal tertentu harus terus dibagi," katanya.

Saut berharap setiap pegawai semakin memahami tugas dan tantangan masing-masing unit dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Agar semua semakin solid dan memahami kesulitan masing-masing. Dengan begitu, kita bisa saling bahu-membahu."

Pertemuan pertama program KoMen Day mengambil tema korupsi e-KTP. Diskusi tersebut mengundang Ariawan Agustiartono, seorang Jaksa KPK yang menangani kasus mega korupsi senilai Rp2,4 triliun itu. Ariawan bercerita bagaimana awal mula kasus e-KTP ini mendapatkan "titik terang" dari sebuah alat bukti yang mereka temukan saat melakukan penggeledahan di Bandung.

Proses pengungkapan dan penangkapan pelaku pun penuh perjuangan. Dalam kesempatan itu, Ariawan memberikan banyak cerita bagaimana strategi yang digunakan serta kerja keras yang dilakukan untuk mengungkap kasus ini.

"Kasus ini kasus keroyokan dari beberapa unit. Menggunakan lima ribu bukti dan ratusan saksi." kata Ariawan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pekerjaan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Semua pekerjaan bisa terselesaikan akibat campur tangan Tuhan.

"Ada rahmat Tuhan yang tertinggal," ujarnya setiap kali mendapat bantuan dari langit.

Selanjutnya, KoMen Day akan dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali dan mengundang berbagai narasumber yang merupakan pegawai dari berbagai unit di KPK. •



Menjelaskan -Jaksa KPK Ariawan Agus Triantono menjelaskan kepada Pegawai KPK yang hadir dalam acara Komen Day tersebut.

**ARKADEMY** 

# BERPIKIR KRITIS DENGAN LENSA KAMERA

FOTO HANYALAH SALAH SATU MEDIUM PESAN. TAK SEKADAR MENYAMPAIKAN KEINDAHAN DARI KOMPOSISI OBJEK. IA JUGA MENGAJAK KITA LEBIH KRITIS.

foto? Atau yang enggak punya media sosial berbasis foto?"

Ben melontarkan pertanyaan itu saat membuka sebuah lokakarya di pertengahan 2019 lalu. Sebuah lokakarya yang membahas secara mendalam apa itu fotografi kritis.

"Masyarakat Indonesia yang sangat visual selama ini lebih sibuk membahas teknis atau estetika. Padahal fotografi adalah bahasa visual yang mengandung berbagai pengetahuan yang berpotensi untuk mempengaruhi perspektif masyarakat," ujar Ben saat itu.

Keprihatinan ini yang membuat Ben laksana, Kurniadi Widodo, Muhammad Fadli, Rara Sekar Larasati, dan Yoppy Pieter membentuk Arkademy, agar setiap orang bisa menggunakan fotografi sebagai medium untuk menyampaikan pesan kritis.

Arkademy mencoba mengajak masyarakat untuk membaca fotografi kritis jauh ke dalam ranah populer. Tujuannya, agar masyarakat bisa mulai membicarakan isu-isu sosial di sekitarnya melalui karya foto yang mereka ciptakan atau mereka lihat. Hal ini

mengingat bahwa fotografi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

"Workshop kita adalah pendidikan kritis tapi berkedok fotografi. Kita mengajak masyarakat untuk memikirkan sisi sosial di sekitar mereka tapi melalui medium fotografi," ujar Ben.

Ben menyampaikan bahwa sering masyarakat tidak sadar kalau fotografi itu sarat dengan kepentingan. Artinya ada tujuan yang coba disampaikan fotografer lewat karyanya.

Untuk itu, Arkademy melatih fotografer untuk "membaca foto" agar bisa memahami apa yang hendak disampaikan oleh pemilik foto. Selain itu, para mentor juga mengajak fotografer untuk melihat sebuah foto dari berbagai perspektif.

"Kita bahas bagaimana melihat sebuah foto dari kacamata isu gender, HAM, dan lainnya."

Menurut Ben, sering kali sebagai pembuat foto, sang fotografer terlalu fokus dengan estetika pada objek. Padahal pembentukan asumsi dari sebuah foto juga penting untuk dicermati. Dalam lokakarya yang diselenggarakan Arkademy, setiap fotografer harus





mendalami isu yang mereka angkat lewat kegiatan terjun ke lapangan.

"Fotografer dipaksa untuk benarbenar terjun ke lapangan dan melihat cerita yang mereka ingin angkat. Fotografi jadi kesempatan untuk mempertanyakan kembali asumsi mereka."

Sebelum terjun ke lapangan, para mentor akan meminta para fotografer untuk membuat kerangka berpikir secara detail dan kritis serta melakukan penelitian mendalam tentang objek foto mereka.

Setelah itu, para fotografer akan terjun ke lapangan selama beberapa hari. Saat itu, fotografer tidak diperbolehkan memakai lensa jarak jauh agar sang fotografer bisa lebih dekat dengan objek.

"Mereka dituntut untuk berinteraksi dengan objek foto, mengenal lebih dalam objek foto dan mendalami isu yang akan mereka angkat."

Selain foto, Ben juga meminta para fotografer untuk menulis *artist state-ment* yang merupakan tulisan singkat sebanyak 750 kata berisi cerita yang diangkat melalui karya foto mereka.

"Kita membutuhkan fotografer yang juga bisa nulis tentang karya-karya mereka sendiri. Kalau tidak ditulis, mungkin pesan yang ingin disampaikan melalui foto-foto mereka jadi tidak tersampaikan dengan baik," tutur Ben.

Setelah terjun ke lapangan, mentor Arkademy akan meminta fotografer untuk memilih 10 foto terbaik untuk disusun menjadi sebuah cerita foto. Dalam proses kurasi itu, Arkademy akan melatih fotografer untuk berpikir kritis tentang karyanya sendiri.

"Akhirnya kita memaksa mereka untuk bertanya kembali apa yang diutamakan dalam cerita foto mereka." Pada akhir sesi lokakarya, para fotografer akan menampilkan karya foto beserta narasi di depan mentor dan seluruh peserta. Kemudian, mentor Arkademy akan memilih cerita foto terbaik untuk disajikan dalam sebuah pameran foto.

Salah satu peserta lokakarya, Lidia Kristi (22 tahun) mengaku sangat bangga ketika melihat karyanya dipamerkan di Galeri Salihara, Jakarta pada November 2019 lalu. Ia cukup kaget ketika mengetahui bahwa karya dengan tema "Hidup Terus Berjalan" miliknya terpilih menjadi satu dari 14 karya yang dipamerkan.

"Enggak menyangka bakal kepilih. Karena secara teknik, banyak karya yang lebih baik. Tapi aku cukup bangga karyaku bisa dipajang di Salihara," ujar Lidia.

Awalnya, Lidia mendapatkan infor-

masi mengenai lokakarya Arkademy dari Ben yang merupakan dosennya di International University Liaison Indonesia. Kemudian, ia mencoba mengikuti lokakarya Arkademy yang saat itu sedang berkolaborasi dengan Resources Institure Indonesia (WRI).

Selama sepuluh hari pada pertengahan bulan Agustus 2019, Lidia mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Dari situ, Lidia mengaku belajar banyak hal, salah satunya mempelajari cara menggunakan medium fotografi untuk lebih empatik, kritis, dan reflektif terhadap orang lain.

"Karena apa yang akan kita foto dan ceritakan maknanya ke pembaca, tergantung (keinginan) fotografernya."

Artinya, fotografer memiliki peran untuk menentukan pesan apa yang coba ia sampaikan kepada penikmat foto. Karya Lidia yang berhasil terpilih untuk pameran foto Kisah-Kisah Tanah Manusia itu mengangkat kisah kehidupan warga Penjaringan dan Bukit Duri setelah direlokasi ke rusunawa Rawa Bebek oleh pemerintah.

"Aku pilih topik ini karena dulu aku pernah tinggal di sana tiga bulan, jadi aku sedikit tahu bagaimana perasaan emosi warga rusun. Marah dan sedih," ujar sarjana Hubungan Internasional itu.

Setelah 2,5 tahun ia kembali, ia justru menemukan fakta kalau masyarakat tidak lagi marah terhadap situasi yang diciptakan pemerintah. Mereka hanya pasrah dan menanamkan kekecewaan ke dalam hati demi bertahan hidup. Lidia mencoba memotret kehidupan warga Rusunawa Rawa Bebek yang pasrah menerima nasib.

Lidia menyampaikan bahwa ia akan terus melanjutkan kegiatan fotografi kritis untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Saat ini, ia sedang menggarap sebuah *project* bertema stereotip kultur Indonesia.

26 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 INTEGRITO | 27

### PERUSAHAAN JADI PESAKITAN

KPK MELAKUKAN TEROBOSAN. TAK HANYA PERORANGAN, PERUSAHAAN JUGA BISA JADI PESAKITAN. PERMA NO. 13 TAHUN 2016 MENJADI SENJATA BARU BAGI KPK DALAM MENJERAT BADAN HUKUM. PT NUSA KONSTRUKSI ENJINERING (NKE) JADI KASUS KORPORASI PERTAMA DAN DIPUTUS BERSALAH. INI DIKUATKAN DENGAN TEMUAN DELAPAN PROYEK STRATEGIS.

UANG PENGGANTI YANG HARUS DIBAYAR OLEH PT NKE, SAMA DENGAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PT NKE SEBESAR RP240 MILIAR DIKURANGI UANG PENGGANTI YANG TELAH DIBAYARKAN DALAM:

- ► Perkara Dudung Purwadi sebesar Rp51.3 miliar
- ► Fee yang diberikan ke Nazaruddin, Rizal Abdullah dkk sebesar Rp67.5 miliar
- ► Uang titipan terdakwa kepada KPK sebesar Rp35.7 miliar

KEUNTUNGAN PT NKE/PT DGI DIPEROLEH DARI 8 PROYEK YANG MENJERATNYA:

- Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Keuntungan Rp24,7 miliar
- Proyek Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan total keuntungan Rp42,7 miliar
- Proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Keuntungan Rp44,5 miliar
- Proyek Rumah Sakit Pendidikan Univ. Mataram total keuntungan Rp23,9 miliar
- Proyek RSUD Sungai Dareh di Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat total keuntungan Rp20,5 miliar
- Proyek Gedung Cardiac RSUD H. Adam Malik total keuntungan Rp4,01 miliar
- Proyek Gedung Paviliun RSUD
   H. Adam Malik total keuntungan Rp2,1 miliar
- Proyek RS Tropis Airlangga Surabaya total keuntungan Rp77,4 miliar

PUTUSAN UNTUK PT NUSA KONSTRUKSI ENJINERING (PT NKE)

Pidana denda **Rp700 juta**, dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda.

Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp85.4 miliar**.

Pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama **6 bulan**.

# **KORUPSI MENGANCAM PERADABAN**

### Faisal Basri

Ekonom

orupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan 'kerah putih' yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan iklim investasi yang tidak sehat. Awal Oktober lalu, integrito berbincang dengan ekonom senior, Faisal Basri tentang korupsi politik hingga korelasi korupsi dan ekonomi. Menurutnya, kejahatan luar biasa ini adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa dan bisa membuat negara ini bangkrut. Berikut petikannya:



### **Bagaimana dampak** political corruption **terhadap perekonomian negara?**

Political corruption bisa membangkrutkan ekonomi. Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti. Tidak ada check and balance, kemudian terjadi systemic corruption, organized corruption dan tiba-tiba ekonomi jadi bangkrut.

Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kaum elite mengontrol pemerintah, ini yang bahaya. Akibatnya kaum elite yang mengatur sedemikian rupa agar negara membuka ruang hingga terjadi eksploitasi hingga monopoli. Korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi korupsi juga musuh untuk peradaban.

### Mengapa korupsi bisa mengancam peradaban?

Korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan Rakyat, malah memarjinalkan kekuatan rakyat. Pemusatan sumber daya ekonomi berada di segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlindungan atau dukungan politik

Analisis saya, mahasiswa ikut bersuara karena masa depan mereka terancam. Mereka bukan cuma memikirkan masa depan Indonesia, tapi mereka juga enggak mau hidup sengsara di masa depan. Makanya mereka mendukung penguatan KPK. Kalau tidak, sama saja menciptakan jalan tol proses perampokan itu.

### Keberadaan KPK membuat ekonomi lemah, pendapat Anda?

Martin Wolf pernah menjelaskan tentang rentier capitalism, istilah dimana pasar dan kekuasaan politik memberikan individu dan pengusaha yang diistimewakan

untuk mengeruk uang yang besar dari orang lain atau negara. Dengan begitu, pembangunan jadi rapuh.

Justru pertumbuhan ekonomi lemah bukan karena ada KPK, tapi ini menandakan bahwa KPK justru harus diperkokoh agar korupsi menjadi sedikit. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kalau sekarang, karena korupsinya merajalela maka pengusaha-pengusaha yang muncul itu tidak siap bersaing. Makanya pengusaha itu pindah ke sektor yang tidak ada pesaing.

Akibatnya, industri semakin sedikit dan melemah. Jadi ekonomi kita makin lemah karena korupsi. KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi.

### KPK mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya?

Tugas KPK seperti The Narrow Corridor. Jadi kita harus bangun koridor sesempit mungkin agar manuver koruptor sedikit. Kita tidak mungkin memberantas korupsi sampai nol. Tapi yang kita bisa, memper sempit manuver mereka. Jadi kalau masih ada korupsi pun, bukan systemic corruption. Bukan korupsi yang membangkrutkan negara. Kalau enggak ada KPK, negara bangkrut.

### Sejak terbitnya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, KPK dapat menjerat korporasi. Apa dampaknya bagi dunia usaha?

Menakutkan untuk mereka yang berbisnis di *gray area*. Tapi, sebenarnya banyak pelaku bisnis yang kotor sudah capai melakukan cara curang. Mereka lapor ke saya tentang bisnis yang kotor. Pelaku bisnis kotor itu, untungnya banyak tapi bayar pajaknya sedikit. Untungnya banyak, dia bawa keluar negeri. Jadi sudah nyolong, untungnya dia bawa keluar negeri. Makanya korupsi itu dibilang *extraordinary crime* yang mem-

bangkrutkan negara.

Hanya pebisnis yang kotor yang memandang KPK itu musuh dia. Karena mereka harus tersingkir dari bisnis. Karena mereka sebenarnya enggak bisa bersaing. Tapi korporasi yang bersih akan senang karena bisnisnya jadi *fair*. Sehingga kalau ada tender, dia akan mengajukan harga terbaik, dengan kualitas terbaik, dan menang. Iklim bisnisnya semakin bagus dan dihargai.

Lihat negara-negara yang paling kaya, seperti Norwegia, Finlandia, Corruption Perception Indeksnya (CPI) paling tinggi. Kalau negara yang banyak bisnis kroninya, CPI-nya rendah, seperti Thailand, Rusia, Malaysia, dan Indonesia ada di nomor 7 di daftar The Crony-Capitalism Index.

### Di Indonesia, lebih banyak pebisnis yang curang atau yang jujur?

Saya enggak tahu. Tapi bisa dilihat perusahaan yang *go public*, yang saham-sahamnya *blue chips* di pasar saham. Biasanya mereka yang punya *good governance*. Perusahaan yang *go public* itu laporan keuangannya jelas dan terbuka. Tapi perbandingannya, dari 1.000 perusahaan besar menengah di Indonesia, hanya 30 yang *go public*. Secara umum bisa digambarkan betapa minimnya perusahaan yang punya *good governance*.

### Mengapa KPK harus tetap kuat?

KPK harus kuat demi peradaban. Peradaban itu bukan cuma ekonomi, tapi juga bidang poltik dan lain sebagainya. KPK sudah terbukti efektif. Kurang lebih 200 kepala daerah dipenjara. Itu pun masih merajalela, enggak ada kapoknya. Karena hukumannya yang ringan dan dipenjara seperti di surga.

Makannya justru harus didukung. Jika KPK lemah, pengendalian terhadap korupsi akan semakin lemah. Sendi-sendi demokrasi akan kian rapuh, oligarki semakin kuat. Pe-

nguasaan sumber daya di tangan segelintir orang dan ketimpangan sosial akan semakin buruk.

Kalau KPK melemah, "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute-ly" bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia emas pada 2045 dibayangi kabut yang pekat. •

### **BIODATA**

### NAMA

Faisal Batubara

### **TEMPAT, TANGGAL LAHIR**

Bandung, 6 November 1959

### PENDIDIKAN

SMA Negeri 3, Jakarta

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985)

Master of Arts (M.A) bidang ekonomi di Vanderblit University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988)

### KARIER

(1985-1987) Anggota tim "Perkembangan Perekonomian Dunia" pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN

(1994-1995) Pakar ekonomi pada P3I DPR-RI

(1996-1998) Anggota Dewan Redaksi majalah "Media Eksekutif"

(2000) Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI

(1999-2003) Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta

(2014) Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas

(1997-sekarang) Editorial Board Quarterly Journal of the Indonesia Economy

(1981-sekarang) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

### **PENGHARGAAN**

(1996) Dosen teladan III Universitas Indonesia

(2003) Pejuang antikorupsi 2003 dari Masyarakat Profesional Madani

(2005) FEUI Award 2005 dalam kategori prestasi, komitmen, dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

32 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 INTEGRITO | 33

### Bersinergi Tingkatkan Penerimaan Negeri



KPK menggelar Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak pada kamis (28/11) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerja sama yang dilakukan KPK dan Ditjen Pajak Kemenkeu untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong laju pertukaran informasi antara KPK, Ditjen Pajak, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya.

### Di Papua, KPK Fasilitasi Rekonsiliasi Aset Rp1,3 Triliun

KPK memfasilitasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam melakukan rekonsiliasi aset terkait Pendanaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen (P3D) di Provinsi Papua. Tercatat, aset berupa tanah dan bangunan senilai total Rp1,3 triliun, berhasil ditertibkan dan dilakukan pencatatan ulang sehubungan dengan beralihnya kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

### Berhasil Tingkatkan Pendapatan Daerah, KPK Terima Penghargaan



KPK menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Makassar atas keberhasilannya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, Selasa (26/11). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Makassar kepada tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK yang telah melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan PAD Kota Makassar.

### Menyuntik Semangat Kebangsaan

KPK menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dan Doa Bersama untuk Negeri pada Rabu (20/11) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pada acara tersebut, KPK mengundang ulama NU Ahmad Muwafiq yang akrab disapa Gus Muwafiq. Kegiatan ini diharapkan pegawai mendapat siraman rohani sekaligus mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam ceramahnya, Gus Murwafiq menekankan pesan cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang harus dipupuk dan ditanamkan dalam pribadi masing-masing pegawai.

KILAS

### **KPK Evaluasi Pendidikan Antikorupsi**



KPK melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang meliputi sekolah tingkat dasar dan menengah. Pada Senin hingga Jumat, 11-15 November 2019, KPK bersama pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dan Jawa Barat meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Cirebon, melakukan kunjungan ke-15 sekolah yang sudah menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan belajar-mengajar. •

### Barang Eks Gratifikasi KPK Dilelang



KPK melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan pelelangan barang eks gratifikasi pada Jumat (25/10) melalui KPKNL Bandung. Terdapat 56 set item barang yang akan dilelang, terdiri dari pakaian, kain, tas mewah, parfum, jam tangan, kalung, produk perawatan wajah, pulpen, cincin batu akik, logam mulia, alat elektronik, hiasan peralatan olah raga, hingga kartu uang elektronik dan youcher. •

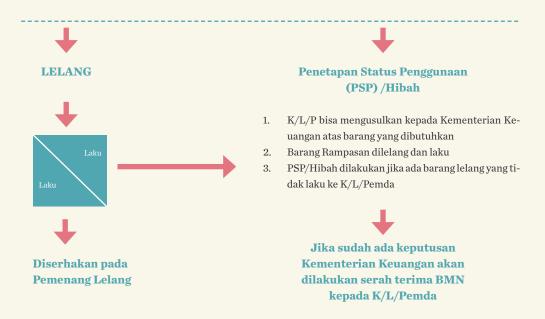
# HIBAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/Tahun 2011** tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi mengatur soal proses hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut alurnya:

Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan hasil dari barang rampasan atau barang gratifikasi sesuai PermenKeu No.03/2011

### KETERANGAN

- I. KPK meninjau lokasi/BMN
- 2. Selanjutnya, jaksa eksekusi melakukan klasifikasi kewenangan penetapan hibah BMN:
  - a. KPKNL Jakarta III untuk aset = Rp500 juta
  - b. KPKNL untuk aset Rp500 juta Rp1 miliar
  - c. DJKN untuk aset Rp1 miliar Rp49 miliar
  - d. Presiden RI untuk aset >Rp49 miliar
- 3. Pihak yang berwenang kemudian akan meninjau lokasi/BMN yang dimaksud
- . Lalu dibuatlah Keputusan Kementerian Keuangan tentang BMN tersebut akan dihibah atau tidak





# SANG PENGAWAS PERENCANAAN ANGGARAN

untutan perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta adanya revolusi industri 4.0, membuat Kementerian berlomba memberikan inovasi, terutama dalam hal pengembangan sistem informasi dan teknologi.

Dikembangkan sejak tahun 2017, aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran -atau biasa disingkat Krisna- dikenalkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuannya untuk mendukung interkoneksi aplikasi milik pemerintah dalam sistem *e-government*, sehingga mampu mendorong pembangunan prioritas yang tepat sasaran, efisien dan akuntabel.

Krisna sendiri digadang agar dapat memungkinkan melakukan proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, hingga evaluasi yang terpantau secara digital.

Misi besar Krisna yaitu dapat mewujudkan APBN yang fokus dan tepat sasaran, sehingga anggaran yang digunakan betul bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.

Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan Basah Hernowo mengatakan bahwa versi Krisna kian berkembang.

"Yang dulu awalnya Krisna hanya digunakan untuk renja (rencana kerja), sekarang berkembang untuk renstra (rencana strategis), lalu RPJMN, dan untuk DAK," jelas Basah saat dihubungi *integrito* lewat sambungan telepon.

Seiring dengan berkembangnya Krisna 3.0 (versi ketiga), Bappenas berusaha menyempurnakan aplikasi ini. Adanya penambahan sub-sistem RPJMN dan Renstra

"Pak Presiden beberapa waktu lalu bilang, Bappenas perlu dijadikan sebagai *clearing house*. Nah, ini kita buktikan bahwa Krisna bisa menjadi clearing house dalam perencanaan penganggaran."

dan terkoneksi langsung dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Krisna diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan berbasis digital.

Sebelumnya, aplikasi e-planning ini diinisiasi dengan memadukan data antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB.

"Dengan adanya DAK, artinya Kementerian Dalam Negeri juga ikut bergabung, yaitu dengan interkoneksi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik Kemendagri. Cakupannya menjadi lebih luas. Makin akuntabel," lanjut Basah.

Bagi Basah, Krisna diharapkan terus

berkembang menjadi lebih holistik dan integratif dalam menjangkau informasi penganggaran dan memberikan informasi kinerja jangka menengah dan tahunan, baik dari pemerintahan pusat maupun daerah.

"Implementasi dilakukan diseluruh K/L dan seluruh daerah. Selama ada (daerah) yang menerima DAK Fisik, maka akan menggunakan Krisna," tutur Basah.

Sistem yang digunakan Krisna secara tidak langsung 'memaksa' K/L dan Daerah untuk mengakses portal yang sudah disediakan untuk mengisi perencanaan anggaran, sebagai syarat untuk pencairan DAK Fisik.

PERINTIS KILAS



Prosedur serupa tentunya untuk mendukung terwujudnya cita-cita Krisna, agar setiap proses perencanaan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan paperless.

Krisna juga memungkinkan agar proses perencanaan tersebut bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan adanya rekam sistem di dalam aplikasi.

"Karena semua data tersimpan dan terdigitalisasi, semua *history* siapa yang masuk, siapa merubah, apa yang dirubah, dan kapan. Semua ada di situ," imbuh Basah lagi.

Dari cerita Basah, utilisasi Krisna memberikan dampak di mana daerah menjadi lebih nyaman tanpa harus takut pada anomali perencanaan anggaran.

Pergantian kabinet Presiden Joko Widodo juga tidak berpengaruh pada kiprah Krisna. Pasalnya, menteri yang baru tetap mendukung Krisna. Malah, Basah menyampaikan bahwa Krisna dijadikan basis data untuk Bappenas.

"Pak Presiden beberapa waktu lalu bilang, Bappenas perlu dijadikan sebagai *clearing house*. Nah, ini kita buktikan bahwa Krisna bisa menjadi *clearing house* dalam perencanaan penganggaran."

Dalam hal upaya bersama pencegahan dan pemberantasan korupsi, data Krisna juga dapat digunakan untuk melihat jika terjadi kasus yang melibatkan perencanaan anggaran.

"Karena digital itu tadi, sehingga data perencanaan anggaran dapat dijadikan bukti jika ada yang nakal," tambah Basah sambil sedikit terkekeh.

Penamaan aplikasi Krisna sendiri terinspirasi dari salah satu dewa dalam kisah Mahabharata, di mana digambarkan dalam kisah tersebut Dewa Krisna sebagai sosok penegak keadilan.

"Terinspirasi dari sosok tersebut dengan harapan serupa, tentunya untuk pengawasan. Lalu kami berikan kepanjangan dari Krisna yaitu Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran." •

### Inilah Pemenang Festival Film Antikorupsi 2019



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pemenang terbaik dan favorit dari ajang Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2019 di Jakarta pada Ahad (8/12). Film *Home Sweet Home* karya Mohammad Ifdhal, menjadi pemenang terbaik dan film Unbaedah karya Iqbal Ariefurrahman sebagai pemenang favorit dalam ajang tersebut.

### **Album B-Side SAKSI DIluncurkan**



Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, KPK menggelar konser Suara Antikorupsi di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jumat, (6/12), sekaligus meluncurkan album kompilasi B-Side SAKSI berisi 9 band peserta Festival SAKSI di tahun 2016-2018 yang masuk ke dalam album kompilasi B-Side SAKSI. Pagelaran ini juga dimeriahkan para musisi tanah air seperti Efek Rumah Kaca, Ananda Badudu, Tashoora, North to East, dan Polka Wars.

**BJ HABIBIE** 

# SICERDAS YANG MEWARISI PESAWAT

PESAWAT TERBANG, ITULAH YANG MEMBAWA NAMA HABIBIE ADA DI POSISI ATAS SEJARAH PENERBANGAN INDONESIA. HABIBIE MENJEMPUT BIDADARINYA, AINUN, MENUJU SANG KHALIK DAN MENINGGALKAN NAMA SEBAGAI MR CRACK.

ulukan Mr.Crack bukan tanpa alasan disematkan bagi Bacharuddin Jusuf Habibie. Istilah *crack* atau keretakan sebenarnya berasal dari lingkungan penerbangan. Pada 1965, usai menamatkan gelar Dr. Ingenieur di Technischule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aachean, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan ternama, yaitu Hamburger Flugzeugbau (HFB), yang terletak di Hamburg, Jerman.

Kala itu, BJ Habibie menerima tantangan Departemen Pertahanan Jerman yang meminta para ahli mencari penyebab jatuhnya pesawat Fokker 28 dan pesawat tempur Jerman Starfighter F-104 G. Ia lalu

mempelajari dengan serius fenomena fatigue (kelelahan) pada badan pesawat yang pada masa itu dinilai sangat rapuh dan tak aman dikendarai.

Suami Ainun ini kemudian berhasil menemukan rumus yang dikatakan mampu menghitung keretakan pada sayap pesawat hingga skala atom dalam material konstruksi pesawat, Crack Propagation Theory. Sejak saat itulah nama BJ Habibie disebut Mr.Crack.

Tidak hanya sampai di situ, teori tersebut nyatanya masuk menjadi buku pegangan soal prinsip-prinsip ilmu desain pesawat terbang standar NATO (North



Atlantic Treaty Organization) dan hingga saat ini rumusnya pun digunakan di industri penerbangan dunia.

Sederet prestasi telah ia torehkan berkat perjuangan, kerja keras, dan ketekunannya di bidang aviasi. Ia bahkan seringkali mendapatkan penghargaan dan gelar kehormatan dari berbagai institusi maupun negara. Misalnya, penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel, penghargaan Das Grosse Verdientkreuz dari pemerintah Jerman, hingga julukan Bapak Teknologi dari seluruh masyarakat Indonesia.

Cerita tentang kecerdasan dan prestasi BJ Habibie di negeri orang pada akhirnya sampai ke telinga Soeharto, Presiden RI ke-2. Tanpa pikir panjang, Soeharto meminta Ibnu Sutowo, salah satu orang kepercayaannya pada saat itu, untuk mengajak BJ Habibie pulang kembali ke Indonesia. Harapannya sederhana, Habibie bisa membantu Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri penerbangan tanah air.

Setelah memperoleh informasi tentang ajakan Presiden Soeharto dari Ibnu Sutowo, Habibie merespons dengan cepat. Ia memutuskan kembali ke Indonesia dan me-



ninggalkan karier dan capaian hebatnya di Jerman pada 1973. Walaupun pada saat itu, Habibie masih harus bolak-balik Indonesia-Jerman mengingat tanggung jawabnya sebagai Vice President di MBB, Messerchmitt-Bolkow-Blohm, belum selesai.

Di Indonesia, Habibie lantas bekerja dengan giat dan menunjukkan karya-karya cemerlangnya. Saat itu, kerja sama Indonesia-Jerman pun semakin terbuka luas. Pada 1973, ribuan orang Indonesia bermigrasi ke Jerman untuk bekerja sebagai perawat. Perdagangan tembakau antara Eropa dan Indonesia juga berpusat di Jerman.

Ia beberapa kali diberi kepercayaan menjabat posisi penting di pemerintahan, di antaranya seperti menduduki posisi-posisi strategis di berbagai perusahaan BUMN, menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun, men-

jadi Wakil Presiden RI, hingga pada puncaknya menjadi Presiden RI ke-3.

Pada industri penerbangan RI, Habibie sukses menciptakan pesawat karya anak bangsa pertama di Indonesia yang diberi nama N-250 Gatotkoco. Pesawat buatan PT. IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) ini berhasil diterbangkan tanpa mengalami dutch roll (oleng berlebihan) dan merupakan satu-satunya pesawat terbang turboprop di dunia yang menerapkan teknologi fly by wire.

Pesawat N250 yang memiliki arti Nusantara atau Nurtanio tersebut sungguh membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Tepatnya 10 Agustus 1995, pesawat yang berdaya tampung 2 pilot dengan 50 penumpang telah menjadi sejarah di mata dunia bahwa Indonesia mampu membuat pesawat terbang.

Berangkat dari Habibie pula sejumlah

kesempatan untuk menimba ilmu di Jerman terbuka luas. Pada 1998, sejumlah profesional Indonesia di bidang penerbangan datang untuk bekerja pada Airbus di Bayern. Kebanyakan dari mereka tentu datang dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Habibie juga telah membukakan mata banyak orang bahwa ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sekadar sekolah dasar. Pendidikan sampai jenjang tertinggi dan berkualitas tidak eksklusif hanya bisa dinikmati masyarakat negara barat. Bangsa Indonesia juga mampu berkarya pada level internasional.

Sungguh menginspirasi. Karya agung N250 BJ Habibie pun tetap dikenang hingga maut menjemputnya. Sang tokoh bangsa wafat pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pukul 18.05 WIB. Ia pergi Suami Ainun ini kemudian berhasil menemukan rumus yang dikatakan mampu menghitung keretakan pada sayap pesawat hingga skala atom dalam material konstruksi pesawat, Crack Propagation Theory.

meninggalkan nama yang begitu harum dengan kisah haru perjalanan sejarah bangsa Indonesia di dunia penerbangan.

Melanie Subono (cucu keponakan Habibie) mengungkapkan keikhlasannya melalui Instagram @melaniesubono. Ia membagikan potret BJ Habibie bersama Ainun – istri Habibie yang telah dikenal publik karena diangkat dalam film layar lebar – dalam bingkai hitam putih seraya menulis caption "Eyang, sampai jumpa di keabadian. Senangnya dah bisa ngelepas kangen sama eyang puteri, bisa berdua duaan lagi. Kita di sini ikhlas asal eyang bahagia. Selamat Jalan."



# KERJA KERAS MERAWAT INDONESIA

KECINTAAN PADA TANAH AIR MENJADI ALASAN KEMBALINYA PARA WNI DI PERANTAUAN. UPAYA MEMBERDAYAKAN DIASPORA MENJADI PERHATIAN JOKOWI AGAR IKUT SERTA MEMBANGUN INDONESIA.

emilih kembali ke Indonesia tidak hanya jadi pilihan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI yang sempat berkarier di Bank Dunia yang bagi sebagian orang mungkin lebih nyaman dan mapan. Tapi, ia justru memilih menerima pinangan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi menteri di kabinetnya.

Pilihan serupa juga datang dari sejumlah penelitei asal Indonesia di luar negeri. Khoirul Anwar, misalnya. Pria kelahiran 22 Agustus 1978 yang dikenal dengan paten teknologi *broadband*-nya itu bahkan sempat ditawari *permanent residence* oleh Pemerintah Jepang karena sudah lebih dari





- Jumpa Pers Chairman Board of Trustees IDN-Global, Dino Patti Djalal (kiri), Wakil Ketua IDN, Said Zaidansyah (tengah), dan Presiden IDN-Global, Mark Gerald Eman, memberi keterangan pers di Jakarta, Juni lalu, sebelum helatan Konferensi Diaspora ke-5.
- Mengabdi Sepulang dari Jepang, Khoirul Anwar kini mengabdi sebagai associate professor di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung.

"Undangan pak Jokowi tentang potensi diaspora membantu Indonesia, itu yang coba kita buat nyata melalui kongres."

Mark Gerald Eman Presiden IDN Global 2017 – 2019 10 tahun belajar dan berkarya di Negeri Matahari Terbit itu. Keluarga, bahkan keempat anaknya juga lahir di sana.

"Ditawari izin tinggal permanen karena kontribusi saya besar, juga prestasi dan penghasilan," katanya.

Karier bagus, keluarga betah. Lalu apa yang mereka cari ketika kembali ke Indonesia? Pria asli Kediri itu hanya berpikir sederhana. Bagaimanapun kondisi Indonesia, dengan segala baik-buruknya, ia adalah orang Indonesia yang mencintai negerinya. Ya, bagi Khoirul benar adanya kalau cinta itu buta, mengalahkan segala ragu.

"Enggak, saya mau pulang ke Indonesia," ucapnya mantap.

Meskipun saat itu ia tidak tahu kapan ia akan pulang ke Indonesia. Yang ia tahu, ia enggan tinggal selamanya di Jepang. Masih ada mimpi besar lainnya untuk Indonesia. Salah satunya, kembali ke almamaternya dengan mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Saya ingin memperbaiki kurikulum di sana," kata lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 itu. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan magister dan doktoralnya di Nara Institute of Science and Technology (NAIST) Jepang.

September 2016, tepat tiga tahun setelah menolak tawaran *permanent residence*, ia kembali ke Indonesia. Meninggalkan pekerjaan sebagai Asisten Profesor di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Ishikawa, Jepang. Di Indonesia, ia memulai profesi baru sebagai Associate Professor di Telkom University, Bandung. Kini, di Telkom University ia juga menjabat sebagai Direktur Center for Advanced Wireless Technologies (AdWiTeech). Tugasnya, menelitei fundamental strategis dan pengembangan teknologi terkini di bidang telekomunikasi nirkabel.

Khoirul Anwar mungkin hanya sedikit dari beberapa diaspora yang punya kisah inspiratif. Keberadaan mereka kini menjadi perhatian pemerintah. Jalinan komunikasi yang intens pun dilakukan, agar mereka yang berkiprah di luar negeri dengan segala prestasi yang membanggakan bisa ikut serta menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Bahkan, termasuk kesediaannya pulang kampung untuk ikut serta membangun Indonesia.

"Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan. Kita akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global," kata Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Juli lalu.

Bentuk 'silaturahmi' juga dilakukan dengan mengadakan Kongres Diaspora di Jakarta. Terakhir, pada tanggal 10–13 Agustus 2019, Indonesian Diaspora Network-Global (IDN-Global) mengadakan Kongres Diaspora Indonesia Kelima (*The Fifth Conference of Indonesian Diaspora/CID 5*) yang diselenggarakan di Jakarta. Tema yang diangkat dalam kongres kali ini ialah "Empowering Indonesia's Human Capital"

"Undangan Pak Jokowi tentang potensi diaspora membantu Indonesia, itu yang coba kita buat nyata melalui kongres," kata Presiden IDN Global 2017–2019 Mark Gerald Eman saat konferensi pers di Jakarta (5/8) lalu.

Sementara Chairman Board of Trustees IDN-Global (2017 – 2019) Dino Pati Djalal menyebut, kongres ini menyasar topik utama dari isu ekonomi, sumber daya manusia, pekerja migran Indonesia hingga kebudayaan. Kongres ini bagian dari dukungan atas visi 2045 yang digaungkan Presiden Jokowi soal Human Capital Development.

Aset SDM diaspora sendiri saat ini sudah ada 1.600 teman-teman diaspora dari 77 negara terintegrasi untuk mengikuti kongres. Menurut Mark Gerald Eman, teman-teman diaspora sendiri berkomitmen ambil bagian membuat Indonesia hebat. Dari kongres ini diharapkan diaspora makin solid untuk memberikan kontribusi.

# BAHASA MENGGUGAT JATI DIRI BANGSA

RAGAM CORAK BAHASA CAMPUR DIANGGAP SEBAGAI FENOMENA YANG MENGIKIS KARAKTER KHAS INDONESIA. BAHASA INDONESIA YANG MAMPU MENYATUKAN RATUSAN BAHASA DAERAH JUSTRU TERANCAM DI NEGERI SENDIRI. BAHASA, BUKAN HANYA SEKADAR ALAT NASIONALISME, TAPI JUGA JATI DIRI.



eorang Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia, Ivan Lanin pernah mengkritik penggunaan bahasa campur aduk Inggris-Indonesia ala anak Jakarta Selatan (Jaksel) yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Anak-anak yang ditaksir dari kelompok usia milenial itu kerap menggunakan kosakata Bahasa Inggris seperti 'literally', 'which is', kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia.

Sebelum ramai dibicarakan di media sosial, gaya bahasa serupa sebelumnya mudah ditemui di warung makan daerah Jaksel, yang kemudian dicap sebagai sebuah identitas baru. Bagi beberapa orang, ini sebuah kekhasan. Bagi sebagian lainnya, menjadi bahan guyonan di media sosial. Lebih ngeri lagi, jadi sesuatu yang mengancam keindonesiaan.

Bagaimanapun, Ivan Lanin melihat fenomena anak Jaksel sudah sejak lama ia temui, khususnya, di lingkungan pergaulan anak muda. Hanya kebetulan saja dicap sebagai identitas anak yang berdomisili di Jaksel. Pria yang dikenal konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu melihat ada beberapa faktor yang membentuk fenomena itu. Salah satunya, ketidakmampuan menyusun kalimat, miskin kosa kata, dan ketidakteraturan dalam berpikir.

"Pembelaan mereka di Twitter, ini untuk language acquisition, tapi itu harusnya ada di kelas. Kalau di Twitter (media sosial), menurut saya itu bukan kelas," katanya. Hal lain yang menjadi pemicu, lanjutnya, adalah perasaan kagum akan hal-hal berbau asing. Ini seolah meneguhkan persepsi kalau menggunakan bahasa campur itu meningkatkan gengsi sosial.

Kekaguman akan sesuatu berbau asing sendiri juga dikenal dengan istilah xenomania. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), xenomania diterjemahkan sebagai kesukaan berlebihan terhadap segala sesuatu yang asing (berasal dari luar negeri). Hal itu juga diungkapkan pengamat budaya asal Perancis yang kini tinggal di Indonesia, Jean Couteau. Baginya, fenomena xenomania itu sudah sejak lama dirasakan.

"Itu penyakit di Indonesia," katanya.

Elite di Indonesia yang terlalu barat, kata Jean, akan terasing dari negerinya sendiri, terutama dari lapisan bawah. Banyak orang semacam itu ia temui dari kelompok anak muda di Jakarta. Kata dia, jangan sampai Indonesia mengulang fenomena yang terjadi di Rusia 100 tahun lalu, dimana elite-elite negara 'beruang merah' itu bicara satu sama lain dengan bahasa Perancis. Akibatnya mereka terasing di negeri sendiri.

Hal itu biasanya terjadi dengan tujuan awal tidak mau dianggap kampungan. Pada akhirnya mereka sibuk membangun eksklusivitas sendiri, melebarkan jarak sosial. Baginya tidak ada cara lain agar bahasa Indonesia tetap lestari, selain menggunakannya di setiap tingkatan. Tidak hanya jadi alat penguat nasionalisme.

Hal sebaliknya, justru yang terjadi banyak warga negara asing yang sangat senang, bahkan bangga bisa berbahasa Indonesia. Sacha Stevenson, misalnya. Warga negara Kanada yang juga seorang Youtuber itu walau belum bisa disebut lebih Indonesia dari Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia bagi ukuran warga asing terbilang sangat baik.

Padahal, pada 2001 datang ke Indonesia awalnya ia bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Nah, ia menempuh cara yang terbilang unik untuk melatihnya berbahasa Indonesia. Ia membuat aturan, membiasakan diri ketika 'nongkrong' bersama satpam, ibu penjaga warung yang kebanyakan tidak bisa berba-

50 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 51



indo: bingung

bandung: bingung euy bekasi: bingung bat dah

jaksel: probably gue tuh yang kek confuse gimana ya, yang kek skeptical gitu gak sih, ya which gue masih enter sandman gitu, yang behind, pokoknya dont look back in anger gitu2 lah.

& Torrelate Tweet

10:07 PM - 29 Aug 2015



- Bahasa 'anak Jaksel' Fenomena bahasa campur antara Indonesia dan Inggris yang sempat viral, disebut bahasa 'anak Jaksel'.
- Kritik Bahasa Vloger Sacha Stevenson dalam salah satu kontennya mengkritik penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris yang dicampur.

### hasa Inggris.

"Saya buat aturan sendiri," katanya.

Di sisi lain, ia punya hobi akting dan seni. Lelah menjadi guru bahasa Inggris, ia banting setir jadi aktor, Youtuber dan mengunggah kemampuannya itu melalui media sosial. Tak dinyana, kepiawaiannya berbahasa Indonesia itu ia tuangkan dalam unggahan Youtube. Tema yang dipilihnya,

terkait kebiasaan orang Indonesia.

Perempuan yang tenar lewat unggahan video 'How To Act Indonesian' dan '5 Tips Anti Ribet' itu berhasil menarik penonton dengan gaya komedian, dan memukau publik dengan kemampuan bahasa Indonesianya. Meski tak jarang, ia juga menerima kritik, cemooh, bahkan komentar rasis akan konten yang kerap ia temukan sehari-

hari dalam interaksi dan budaya di Indonesia.

"Saya suka jalan dan lihat kaki lima. Saya juga suka lihat durian di pinggir jalan, lihat warna-warni buah, warkop (warung kopi), dan lihat orang duduk minum kopi sambil angkat satu kaki," ungkapnya.

Kecintaan serupa yang dirasakan Sacha, banyak dirasakan bule lain juga. Zorica Dubovska, bule asal Ceko sangat cinta bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Padahal, tidak banyak WNI yang minat mempelajari Sanskerta. Ia termasuk orang yang berperan dalam penciptaan kata 'Swa' di Indonesia, bahkan hingga masuk di KBBI. Seperti Swasembada, Swadaya, dan sebagainya.

Menurut Dubovska, kata itu muncul dari istilah *svepomoc* dalam sebuah brosur

"Tidak ada di negara lain, di tengah ratusan bahasa daerah, tapi kita memiliki jati bahasa yang mampu merekat semua suku, agama, budaya, bahasa yang beragam ini."

### **Dadang Sunendar**

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Pusat Perbukuan Kemendikbud

koperasi dari bahasa Ceko pada 1970-an. Secara harfiah, dalam bahasa Indonesia artinya "pertolongan pada diri sendiri". Ia juga banyak terinspirasi dari Presiden Soekarno yang membuat kata-kata baru dari bahasa Sanskerta. Seperti pramugari dan peragawati. Dubovska menemukan padanan kata pomoc dalam bahasa Sanskerta, yaitu sambangda atau sambada yang artinya mampu dan mendapat awalan swa yang artinya mandiri. Awalan swa- dalam bahasa Sanskerta memiliki makna yang sama dengan sve dalam bahasa Ceko.

Atas jasanya itu, pemerintah mela-

lui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 42 orang, salah satumya Zurica Dubovska dengan penghargaan Bintang Jasa Pratama.

Terlepas dari respons publik akan fenomena itu, apakah hal itu mulai mengkhawatirkan?

Pada 2017, dalam sebuah diskusi Bulan Bahasa dan Sastra di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Pusat Perbukuan Dadang Sunendar mengungkap masifnya penggunaan bahasa asing di ruang *public*, seperti pada nama bangunan, reklame, bahkan papan penunjuk *public*, menjadi faktor pengancam eksistensi bahasa Indonesia.

Padahal baginya, juga bagi sebagian besar pemerhati, bahasa Indonesia itu jati diri bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan.

"Tidak ada di negara lain, di tengah ratusan bahasa daerah, tapi kita memiliki sati bahasa yang mampu merekat semua suku, agama, budaya, bahasa yang beragam ini," ielasnya.

Maka dari itu ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ibu, bapak, dan para pengusaha untuk menyayangi dan mencintai betul bahasa Indonesia, utamanya di ruang publik. Karena itu yang paling mudah ditemui anak-anak. Jika semuanya berbahasa asing, ia khawatir lama kelamaan bahasa Indonesia tergusur.

"Jangan sampai itu terjadi," ungkapnya. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri diamanahkan melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2009. Dalam pasal 36 disebutkan, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama jalan, merek dagang, nama hunian, dan sebagainya. Sayang sebagai negara hukum dan warga negara, kita masih cenderung abai. Untuk mencari solusi permasalahan itu, Badan Bahasa tidak bosan-bosan melakukan berbagai gerakan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik agar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri."

KLINIK LHKPN KLINIK GRATIFIKASI



# SEMUDAH APLIKASI OJEK ONLINE

Maruli, (via twitter)

Kapan kita bisa lapor dan mengecek LHKPN pejabat semudah mengecek saldo di aplikasi ojek online?

Saat ini jika masyarakat ingin mengecek laporan harta kekayaan pejabat dan penyelenggara negara bisa dilakukan melalui smartphone berbasis website. Untuk aplikasi LHKPN berbasis iOS atau pun android, saat ini masih dalam proses pengembangan di Direktorat PP LHKPN. Kami harapkan dapat segera digunakan dan *user friendly*.

### PEJABAT DIPECAT, TETAP LAPOR LHKPN?

Ananda, Jakarta

Komisaris BUMN yang dipecat, apakah tetap harus menyampaikan LHKPN? Terima kasih.

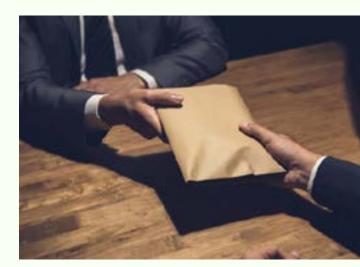
Sesuai dengan Pertaruran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016, komisaris tersebut tetap melaporkan LHKPN sebagai laporan khusus setelah akhir masa jabatan. Kewajiban melaporkan LHKPN itu dilakukan saat awal menjabat, selama menjabat serta di akhir masa jabatan.

# GRATIFIKASI PENERIMAAN CPNS

Abalia, via twitter

Bagimana caranya melaporkan gratifikasi penerimaan CPNS?

Melaporkan gratifikasi yang diterima diri sendiri, dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke KPK dengan alamat Direktorat Gratifikasi KPK di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, atau melalui email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id . Bila hendak melaporkan praktik penerimaan gratifikasi pada proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh oknum PNS, maka saudara dapat menyampaikannya melalui Pengaduan Masyarakat telepon 198, atau dapat juga dilaporkan melalui email pengaduan@kpk.go.id, atau serta datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK.

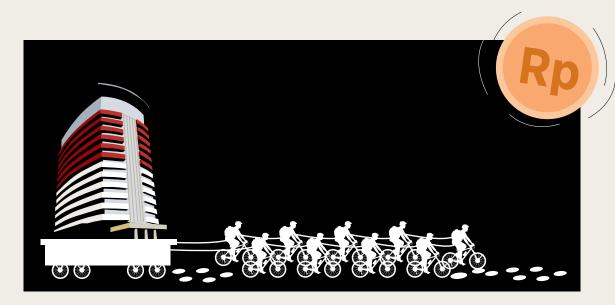


### DANA CSR UNTUK PEJABAT

Arya, Jakarta

Ada sebuah perusahaan yang memberikan dana CSR kepada pribadi pejabat di daerah, apakah itu termasuk gratifikasi? Terima kasih

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi persoalan ekonomi, sosial atau lingkunan. Namun bila dana tersebut malah diberikan kepada pribadi pejabat atau penyelenggara negara, maka hal tersebut termasuk ke dalam gratifikasi yang dilarang. Bagi pejabat tersebut, penerimaan itu wajib dilaporkan ke KPK.



### MENITIP HARAPAN PADA KOIN RECEHAN

KETIKA ANGGARAN YANG DIAJUKAN UNTUK GEDUNG BARU KPK DITOLAK, MASYARAKAT LANTAS BERGERAK. MENGUMPULKAN KOIN DAN RECEHAN, AGAR HARAPAN TETAP MENYALA PADA PERLAWANAN TERHADAP KORUPSI.

embilan pemuda itu mengayuhkan sepeda ontel selama sembilan hari untuk menempuh perjalanan dari Jember ke Jakarta. Dari kaos putih yang dikenakan, kita tahu bahwa para pesepeda itu berasal dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember.

Perjalanan 898 Kilometer yang ditempuh Agus Hamdani dan teman-temannya demi mengantarkan botol-botol air mineral 1,5 liter berisi koin-koin yang mereka kumpulkan sepanjang jalan. Koin itu akan mereka serahkan ke Posko "Koin untuk KPK".

Sesampainya di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Juli 2012, mereka disambut Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas dengan rasa haru. Agus langsung menyerahkan botol-botol berisi koin itu untuk membantu dana pembangunan gedung baru KPK.

Agus dan rekan-rekannya merupakan

satu dari ribuan warga yang menyumbang untuk pembangunan gedung baru KPK dalam gerakan "Koin untuk KPK".

"Tukang ojek, pengamen, pedagang, hingga mahasiswa. Masyarakat berbondong-bondong kasih koin untuk KPK. Bahkan ada yang rela jual mobil," kenang Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang kala itu berkiprah di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Gerakan itu muncul setelah DPR menolak pengajuan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Anggaran sebesar Rp187,9 miliar itu ditolak DPR pada 12 Juni 2008. Nasib serupa juga kembali terjadi, saat anggaran itu diajukan lagi pada 16 September 2008.

Saat itu KPK membutuhkan gedung baru yang lebih besar untuk menampung seluruh pegawai. Gedung KPK yang berada di bilangan Jalan Rasuna Said itu hanya berkapasitas 350 pegawai, namun diisi oleh 700 pegawai. Bahkan, ratusan pegawai lainnya harus menumpang di Gedung Ombudsman RI dan Gedung Kementerian BUMN.

Keprihatinan masyarakat, melahirkan gerakan "Koin untuk KPK". Koalisi Masyarakat Sipil bahkan menyiapkan sebuah rekening khusus untuk menampung sumbangan masyarakat.

Setiap pukul 15.00, Koalisi Masyarakat Sipil selalu menggumumkan perolehan donasi melalui konferensi pers atau akun media sosial Twitter @SaweranKPK dan @KoinKPK.

"Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas dana yang diterima koalisi," ujar Koordinator Koin KPK Illian Deta Arta Sari

Dari gerakan ini, koalisi berhasil mengumpulkan Rp403 juta untuk gedung baru KPK.

Menurut Febri, sumbangan masyarakat itu adalah salah satu dari sekian banyak simbol dukungan masyarakat kepada KPK.

"Tidak mungkin berkantor di Gedung Merah Putih KPK, kalau tidak ada komitmen koin sumbangan beberapa tahun lalu."

Gerakan masyarakat ini juga berhasil mendesak DPR untuk menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK sebesar Rp168 miliar saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) pada 11 Oktober 2012.

Pembangunan gedung baru KPK lalu dimulai sejak 29 Desember 2013 dan diresmikan pada 29 Desember 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Peresmian tersebut juga disaksikan oleh Mantan Presiden RI BJ Habibie, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Pimpinan KPK periode sebelumnya, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Gedung yang kini kerap disebut sebagai Gedung Merah Putih KPK resmi digunakan sejak 6 Februari 2017. Menurut Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pembangunan gedung ini telah melalui perjuangan yang luar biasa. Gedung ini adalah simbol bahwa masyarakat masih menitipkan harapan kepada KPK.

"Gedung ini dulu dibangun bukan hanya gagasannya yang diperjuangkan, namun pembentukannya juga diperjuangkan oleh masyarakat pakai recehan. Luar biasa sekali. Maka kemudian ada spiritualitas ini, enggak akan ada gedung ini kalau enggak ada masyarakat yang ingin menitipkan harapan itu."





## HUKUMAN BERAT PARA 'PENGERAT'

HUKUMAN BERAT SEMESTINYA MENJADI SENJATA AMPUH MELENYAPKAN KORUPTOR. PARA 'PENGERAT' KEUANGAN NEGARA ITU HARUS DIBUAT JERA.

sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 121 tersangka dari operasi tangkap tangan. Rasanya, berpuluh-puluh kali KPK menindak pelaku korupsi, namun tidak juga membuat para 'pengerat' keuangan negara itu jera.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan korupsi dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Bahkan, dalam undang-undang ter-

sebut disebutkan bahwa pelaku korupsi juga dapat dijatuhi pidana mati dalam ke-adaan tertentu. Meski begitu, vonis terhadap koruptor di Indonesia masih rendah. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis tindak perkara korupsi pada Pengadilan Tipikor hanya dua tahun, dua bulan.

Beberapa negara di dunia justru memiliki hukuman yang mengerikan untuk koruptor. Tak segan-segan, beberapa negara bahkan dengan tegas memberikan hukuman mati untuk koruptor di negaranya.

Seperti halnya China yang telah tegas mengibarkan bendera perang dengan korupsi sejak rezim Lui Shaoqi hingga Presi-

- Hukum Mati Sepanjang 2013 pemerintah china hanya eksekusi 2.400 terpidana mati.
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dukung komitmen pemberantasan korupsi di negaranya.

den Hu Jintao. Era keemasan China dalam memberantas korupsi pada masa kepemimpinan Presiden Jiang Zemin di tahun 1999-2003.

Jiang mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri China saat itu, Zhu Rongji yang dikenal sebagai penyelamat uang rakyat. Salah satu ucapan Zhu yang paling fenomenal saat itu adalah, "Berikan saya seribu peti mati, 999 peti akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi."

Komitmen pemberantasan korupsi di China dilanjutkan oleh Presiden Xi Jinping. Sejak dilantik 14 Maret 2013, ia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Badan Antikorupsi China mengatakan sejak 2013, sekitar 1,34 juta pejabat dihukum dalam program antikorupsi yang dicanangkan Presiden Xi Jinping. Banyak di antaranya yang dihukum mati dengan cara ditembak kepalanya.

Salah satunya mantan Wakil Wali Kota Shanxi, China Zhang Zhongsheng yang divonis bersalah atas penerimaan suap sebesar Rp2,1 triliun. Ia dituduh menggunakan pengaruhnya untuk membujuk otoritas di Luliang maupun Shanxi untuk membatu pengurusan proyek batu bara.

"Aksi Tuan Zhang yang sangat rakus menimbulkan kerugian terhadap negara dan rakyat. Seluruh asetnya akan disita," kata pengadilan dalam pernyataannya yang dikutip dari South China Post, Rabu, 28 Maret 2018.

Atas perbuatannya, Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah di Kota Linfen menjatuhkan hukuman mati untuk Zhang.

Selain dihukum mati, koruptor kelas kakap di China akan menjadi penghuni penjara berkeamanan tinggi Qincheng atau



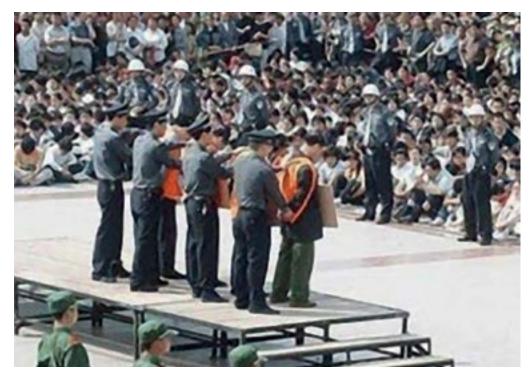
"Jika Anda membayar pajak, biaya atau mendapat sertifikat dan pejabat meminta suap, pukul mereka. Jika Anda memiliki senjata, Anda dapat menembaknya, tetapi jangan membunuh."

yang kerap dijuluki "Kandang Harimau". Penjara ini disediakan untuk menampung terpidana pejabat negara mulai dengan jabatan paling rendah wakil menteri.

Penjara ini dijaga amat ketat dengan pengawasan 24 jam. Beberapa mantan narapidana yang pernah menghuni penjara itu mengaku diperlakukan dengan tidak manusiawi. Saat ini hampir 100 koruptor kelas kakap menghuni penjara tersebut.

Selain China, perlawanan terhadap korupsi juga dikibarkan di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang mengizinkan warganya untuk menembak pejabat publik yang ketahuan menerima suap.

58 INTEGRITO | EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 EDISI 4 TAHUN 2019 INTEGRITO | 59



Komitmen Filipina dalam memberantas korupsi memang tak main-main. Terbukti dengan beratnya hukuman yang diberikan kepada istri mendiang Presiden ke 10 Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos.

Pengadilan korupsi Filipina menyebut Imelda bersalah atas tujuh dakwaan pelanggaran Undang-Undang Antikorupsi. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara antara 6-10 tahun untuk setiap dakwaan, demikian yang dikutip dari BBC, Jumat, 9 September 2018.

Keputusan itu juga melarang mantan Gubernur Manila ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan memegang jabatan publik secara permanen.

Sementara itu, sejak 1961, Malaysia sudah mempunyai Undang-Undang Antikorupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada 1982, Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut.

Pada tahun 1997, Malaysia bahkan memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act yang mengatur tentang hukuman gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Namun sayangnya, pada 2018 lalu dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati demi hak asasi manusia.

### Sita Semua Harta

Di Indonesia, koruptor tetap kaya meskipun sudah berhasil diciduk KPK. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Jerman dan Amerika yang membuat koruptornya miskin dengan denda yang besar serta menyita seluruh harta hasil korupsi.

Seperi Jerman, menurut Strafgesetzbuch atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman, siapapun yang menawarkan, membayar, atau menerima sogokan dalam transaksi domestik atau asing dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara, membayar sejumlah denda dan menyita seluruh harta hasil korupsi.

Sementara itu di Amerika Serikat, pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman 5-20 tahun penjara dengan denda 100 ribu-5 juta dolar AS untuk setiap tindak pidana korupsi.

**RARA SEKAR** 

### SUKSES YANG SESUNGGUHNYA

SUKSES DAN BAHAGIA, DUA HAL YANG DICARI SETIAP ORANG. BAGI RARA, DUA HAL ITU HARUS DINIKMATI BERSAMA, TAK SEMATA-MATA SEORANG DIRI SAJA.

ejak kecil, Rara Sekar Larasati atau yang biasa dipanggil Rara selalu meneladani kepedulian yang dimiliki kedua orang tuanya. Profesi sebagai pengajar dan terapis membuat Rara melihat jelas, betapa kedua orang tuanya memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain.

Itulah yang membuat musisi kelahiran Bandung, 7 Juni 1990 ini belajar, bahwa tujuan hidup itu sebenarnya bukan hanya untuk membahagia kan diri sendiri, namun harus selalu berbagi segala sumber daya yang kita miliki. "Aku menerjemahkannya dengan bentuk aktivisme," cerita Rara kepada

Rara juga dikenal sebagai pegiat sosial yang kerap menyoroti banyak permasalahan sosial di Indonesia. Menurut Rara, persoalan yang sering terjadi adalah dampak dari kekerasan struktural yang kerap tidak terlihat namun menimbulkan bahaya laten, seperti korupsi.

"Budaya korupsi membuat kita tidak adil sejak dalam pikiran. Kita mungkin terlalu memikirkan diri sendiri."

Rara menilai bahwa perilaku korup itu membuat setiap manusia menjadi egois, hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib atau kebahagiaan orang lain. Semua itu mereka lakukan demi meraup keuntungan materi.

"Padahal kebahagian itu adalah keuntungan yang lebih mahal dari finansial," ujar mantan vokalis Banda Neira itu.

Ini mendorong Rara untuk mendukung dunia aktivisme. Melawan korupsi menurut Rara sangat penting demi kesejahteraan masyarakat. Indone-

sia harus berubah melawan sistem yang sudah korup.

> Dengan caranya, Rara menunjukan kepedulian lewat organisasi Arkademy yang fokus pada fotografi kritis. Dari situ, Rara bisa bergerak memberikan pesan kepada masyarakat maupun kerabatnya lewat fotografi. Rara berharap bisa menggugah hati setiap orang yang melihat foto tersebut.

> > "Kalau satu orang melawan sistem yang sudah korup, tidak akan terjadi perubahan. Tapi kalau dilakukan secara kolektif, kita bisa melawan," ujar lulusan Victoria University of Wellington, New Zealand ini.



# JALAN PANJANG MEMBENTUK KARAKTER ANAK

etiap orang tua, menginginkan anaknya tumbuh dengan sehat. Untuk itu, berbagai asupan bergizi yang menyehatkan, dan pembiasaan olahraga dilakukan agar anak-anak terbiasa dengan pola hidup sehat sejak dini. Orangtua seolah telah memahami cara menjadikan anak yang sehat.

Tapi apakah orangtua tahu, bagaimana menjadikan anak yang baik?

Ternyata tidak semudah menjadikan anak yang sehat. Untuk mendidik anak menjadi baik, diperlukan "proses tanam" yang cukup panjang, yaitu sekitar 20 tahun. Melalui pembiasaan dan pengajaran tentang cara bersikap dan berpikir yang baik, sepanjang itu pula, orangtua perlu melakukan 'perawatan' atas apa yang mereka tanam.

Dalam proses pembiasaan ini, tak hanya peran serta orangtua saja yang dibutuhkan, melainkan semua anggota keluarga di rumah sangat penting sekali untuk membentuk karakter yang baik sejak dini. Keluarga adalah sebagai tempat pembentukan karakter masing-masing anggotanya.

Sebab, karakter anak yang terbentuk dari lingkungan keluarga akan dibawa ketika anak berinteraksi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Begitu pula, sikap dan perilaku keseharian keluarga di rumah, dapat memengaruhi karakter anggota keluarga lainnya.

Jadi, janganlah kita sebagai orangtua ingin cepat menuai hasil yang baik, kalau proses menanam yang panjang dan melelahkan itu, belum sempurna kita lalui dan rasakan. Tentu saja, menanam durian akan berbeda waktu menanamnya dengan tanaman kecambah. Perlu waktu yang cukup panjang untuk menanamkan karakter pada anak.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita sebagai orangtua dalam proses penanaman itu. Pertama, tanamkan bahwa Tuhan dekat dengan kita sebagai hamba-Nya. Dia ada di manapun kita melangkah dan berada. Dia Mahatahu apapun yang kita pikirkan dan yang tersembunyi di hati.

Dengan menumbuhkan keyakinan itu, maka seorang anak akan merasakan bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap sikap dan perkataan kita. Dengan begitu, diharapkan di kemudian hari, anak-anak kita tidak akan berperilaku menyimpang, termasuk korupsi.

Kedua, menanamkan karakter kepada anak itu jangan banyak koreksi, tetapi perbanyaklah koneksi. Koneksi itu adalah keterhubungan hati antara orangtua dan anak. Adu hati, bukan adu logika. Sehingga anak akan merasakan getaran ketulusan yang terpancar dari ketulusan hati orangtua yang diterima pada hati anak.

Ketiga, sikap dan perilaku keseharian orangtua di rumah juga dapat membentuk karakter anakanak. Dalam Bahasa yang lain, "Seribu nasihat tidak lebih baik dari sebuah contoh teladan." Itu sebab, sebagai orangtua, kita harus menjadi teladan dan idola pertama bagi anak-anaknya. Karena mereka akan melihat kita sejak akan tidur, hingga bangun tidur. Mereka merekam bagaimana cara kita makan, bergaul, bercanda, memperlakukan anggota keluarga yang lain, bahkan beribadah.

Keempat, selayaknya proses menanam sebuah pohon, maka selayaknya bagi orangtua untuk melakukan pengawasan atas segala upaya yang telah dilakukan. Kita perlu memperhatikan, membatasi dan menjauhkan, apa dan siapa saja yang bisa menjadi 'hama' bagi karakter anak-anak kita. Juga sebaliknya, apa dan siapa saja yang bisa 'menyehatkan'.

Yang juga perlu diperhatikan, faktor keseragaman visi antara ayah dan ibu dalam proses 'menanam' juga punya pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter anak. Ia harus serasi. Jangan sampai, antara ayah dan ibu memiliki perbedaan nilai yang ditanamkan pada diri anak, agar tak mengalami kebingungan. Karena itu, perlu kiranya persamaan persepsi di antara keduanya, untuk menentukan nilai-nilai apa saja yang akan dianut dan ditanamkan secara konsisten.

# MENCARI KORUPTOR DI LABIRIN

Hai, Adik-adik! Mari kita bermain bersama, yuk. Kali ini, kamu berperan sebagai Penyidik Cilik yang sedang mencari koruptor. Sebagai seorang penyidik cilik, kamu tentu tahu bahwa jalan untuk menemukan koruptor sangatlah sulit dan penuh liku.

Dibutuhkan upaya dan konsentrasi yang tinggi hingga kamu sapai menemukan koruptor. Oh iya, kalian bisa menggunakan spidol berwarna untuk menandai jalur yang sudah kalian lalui sebelumnya.

Segera bersiap dan konsentrasi ya.

Ayo, mulai!



# BERBAGI ASA MERAIH BEASISWA

alam sharing session yang dilakukan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) di awal Oktober (4/10) di Perpustakaan KPK, Akhmad Apriliyanto membagikan semangat dan tips untuk mendapatkan beasiswa.

Peraih Chevening Scholarships 2012 ini mengatakan, bahwa beasiswa ini merupakan kesempatan emas yang membidik calon pemimpin dunia di masa depan guna mengembangkan diri mereka. "Selain itu di sana mahasiswa juga bisa mengembangkan jaringan di Inggris Raya," katanya.

Program ini menyediakan dua macam pilihan penghargaan yang bisa diambil yaitu *Chevening Scholarships* dan *Chevening Fellowships*. "Penerima penghargaan ini sepenuhnya diseleksi oleh Kedutaan Besar Inggris dan *High Commissions* yang tersebar di berbagai penjuru dunia," katanya.

Dalam mendapatkan beasiswa tersebut Akhmad mengatakan ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Harus memiliki gelar S1 dengan nilai di atas rata-rata; tidak memegang kewarganegaraan atau dwi ke-

warganegaraan Inggris; bukan pekerja, mantan pekerja, atau memiliki hubungan dengan pekerja di Pemerintah Inggris; dan belum pernah mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Inggris sebelumnya.

Selain kriteria-kriteria tersebut juga harus memenuhi persyaratan Bahasa Inggris sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Chevening. Dalam memenuhi kriteria tersebut, harus mengikuti tes bahasa Inggris yang bisa melalui IELTS, Pearson PTE Academic, TOEFL iBT, Cambridge English: Advanced (CEA), atau Trinity ISE II (B2). Selain itu, salah satu kriteria penting yang harus dipenuhi juga adalah memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun atau setara dengan 2.800 jam.

"Pengalaman kerja yang dimaksud adalah pekerjaan tetap (full time), pekerjaan paruh waktu (part time), pekerjaan sukarela, magang (dibayar maupun tidak dibayar), dan pengalaman kerja lainnya yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah kamu lulus kulliah S1," katanya.





Oleh **Mutia Rizal** 

Analis Post-birokrasi & Executive Editor di Birokratmenulis.org

### DEMOKRATISASI DALAM BUDAYA ANTIKORUPSI DI BIROKRASI

ntuk lebih memahami budaya agar mampu berperan dalam lingkungan sosial di sebuah komunitas, terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu sistem sosial sebagai tempat berlangsungnya sebuah budaya.

Sistem sosial terdiri dari berbagai pemaknaan dan tujuan, bentukan struktur, dan proses yang berkembang menjadi budaya. Sistem sosial dapat menjelaskan budaya dari komunikasi yang terjalin dalam relasi sosialnya. Dalam komunikasi tersebut terdapat pemaknaan atas simbol-simbol budaya yang kemudian bermuara pada tindakan individu. Dapat dikatakan bahwa untuk memahami budaya dalam sistem sosial, kuncinya ada pada interaksi komunikasi.

### **Membentuk Budaya**

Dikatakan Jan Pfiester, seorang ahli manajemen pengendalian organisasi, bahwa dalam sebuah komunitas, termasuk di komunitas birokrasi, komunikasi dapat ditangkap dan juga dibangun melalui berbagai batasan tujuan (*purpose boundaries*). Batasan tujuan itu dapat menjelma dalam berbagai pernyataan, mulai dari visi-misi organisasi, sampai dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Dapat dikatakan, batasan tujuan adalah batasan apa yang ada

di dalam dan di luar budaya di sebuah komunitas. Terkadang batasan tujuan tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat ditangkap dari berbagai interaksi komunikasi anggota komunitas.

Purpose boundaries terdiri dari dua macam, yaitu tertutup (closed) dan terbuka (open). Mekanisme tertutup dan terbuka ini dapat diibaratkan sebagai sebuah pintu rumah. Jika pintu tertutup, maka rumah tidak dapat dimasuki. Begitu juga sebaliknya.

Batasan tertutup dapat didefinisi-kan sebagai suatu batasan yang membuat perilaku tertentu tidak diterima dalam suatu budaya di lingkungan sosial tertentu. Adapun batasan terbuka, didefinisikan sebagai sebuah batasan yang menerima pengaruh dari luar komunitas yang dapat mempengaruhi budaya intern. Pengaruh tersebut dapat memungkinkan adanya adaptasi lingkungan ekstern ataupun sekadar mendialogkan budaya intern dengan lingkungan ekstern.

Faktor utama penguat batasan yang bersifat tertutup adalah pemimpin komunitas (organisasi). Pimpinan dapat memberikan berbagai arahan organisasi. Semakin jelas arahan atau larangan, maka akan semakin kuat batasannya. Terhadap

larangan tersebut, budaya sebuah organisasi telah mulai didefinisikan. Lingkungan ekstern tidak lagi mendapat tempat untuk mempengaruhi budaya yang sudah ditetapkan pimpinan. Mekanisme, prosedur, bahkan penghargaan dan hukuman telah terdefinisikan dengan jelas secara intern dan menjadi sebuah praktik hidup dalam organisasi.

Adapun dalam batasan yang bersifat terbuka (open boundaries), lingkungan lebih demokratis karena budaya yang ada dalam komunitas dapat dipengaruhi bahkan dievaluasi dengan berbagai pengaruh dari lingkungan ekstern. Dalam hal ini, budaya tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi lebih dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan internal dan eksternal. Pemimpin memiliki peran untuk mengondisikan suasana demokratis dalam memperdebatkan kembali secara konstruktif berbagai nilai-nilai atau norma yang telah berlaku di komunitas. Artinya batasan tertutup dapat 'didobrak' dengan adanya batasan terbuka ini. Adapun jika pemimpin tidak mengondisikan suasana demokratis, maka para anggota komunitas sejatinya dapat menyalurkannya dengan sesama anggota komunitas lainnya.

### Bagaimana Sebaiknya?

Dalam hal budaya antikorupsi di sebuah institusi, sebaiknya budaya dibangun melalui dua batasan tersebut, baik terbuka maupun tertutup. Institusi birokrasi saat ini cenderung membentuk budaya hanya secara tertutup, melalui rasionalitas modern birokrasi dan cenderung menolak budaya luar organisasi, sebagai misal budaya setempat (lokal), yang sebenarnya lebih mengutamakan sikap-sikap etis. Budaya antikorupsi yang dikembangkan dalam suasana tertutup biasanya mengandalkan berbagai aturan, kode etik, dan standar prosedur dengan jargon profesionalitas dan integritas. Berbagai aturan dan ketentuan juga biasanya diawasi oleh pimpinan atau satuan tugas yang disertai dengan sanksi yang tegas. Pembentukan budaya antikorupsi yang demikian sebenarnya sebuah bentukan budaya yang eliteis yang dapat terjerumus pada istilah 'tajam ke bawah, tumpul ke atas'.

Apalagi, budaya patronase masih saja terlihat dominan di birokrasi. Budaya tersebut terbukti menciptakan kesenjangan kekuasaan yang cukup lebar antara patron (atasan) dengan client (bawahan). Client tidak dapat leluasa mengingatkan atau melawan patron yang diketahui melakukan tindakan penyimpangan. Perilaku birokrat (client) yang ingin mempraktikkan integritasnya, seringkali tidak didukung secara kultural oleh lingkungan. Hal itu terbukti dengan adanya slogan yang diinisiasi oleh KPK, yang berbunyi "Berani Jujur Hebat!" untuk jujur dan berintegritas saja memerlukan keberanian, hal itu mengisyaratkan bahwa budaya patronase masih sangat kuat di birokrasi.

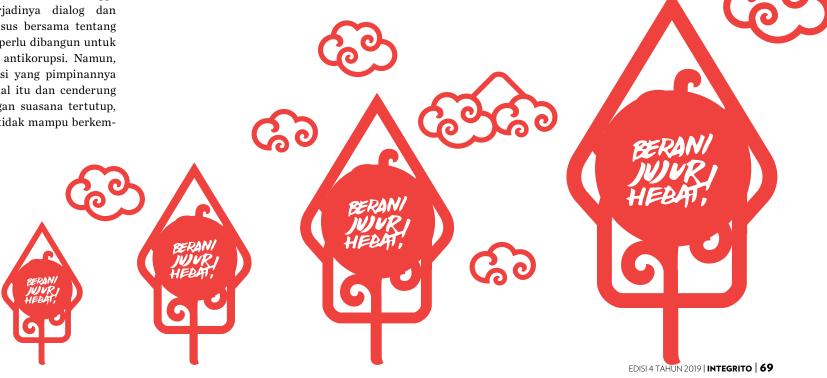
Pembentukan budaya korupsi seyogyanya memperhatikan hal tersebut, dan mengatasinya melalui batasan terbuka. Dalam batasan yang bersifat terbuka, budaya antikorupsi di organisasi tidak lagi bersifat eliteis atau tergantung pada pimpinan. Beruntung bagi institusi yang pimpinannya bersikap lebih demokratis, sehingga memungkinkan terjadinya dialog dan menemukan konsensus bersama tentang simbol-simbol yang perlu dibangun untuk membentuk budaya antikorupsi. Namun, malang bagi institusi yang pimpinannya belum memahami hal itu dan cenderung 'lebih nyaman' dengan suasana tertutup, budaya antikorupsi tidak mampu berkembang secara alami.

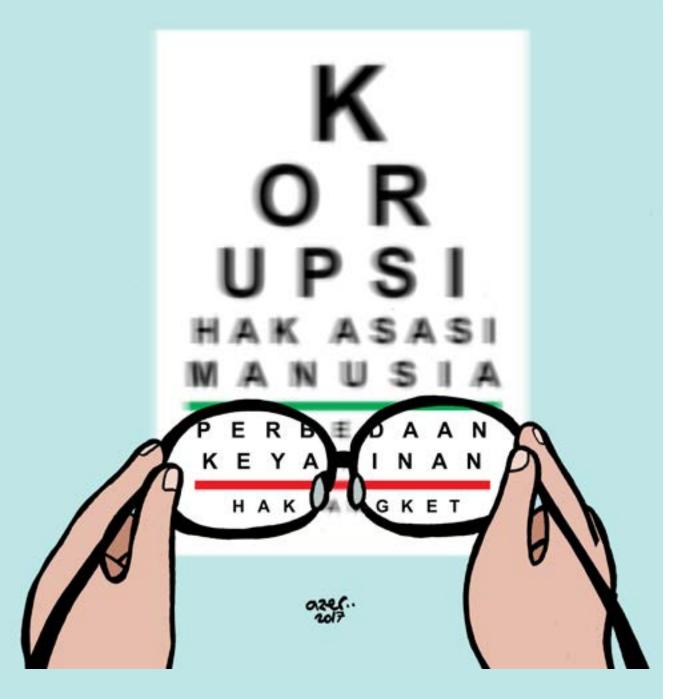
Dalam kondisi demikian, sebenarnya anggota komunitas, yakni para birokrat, dapat berjuang membentuk budaya antikorupsi tanpa tergantung pimpinan. Para birokrat dapat juga mengambil nilai-nilai budaya lokal yang kemudian disepakati bersama dan dikembangkan bersama. Pengembangan tersebut dapat dimulai oleh sekelompok kecil birokrat, dengan terlebih dulu membangun konsensus di antara sesama birokrat. Konsesnsus tersebut diperlukan, selain untuk membangun kesepakatan juga berguna sebagai modal sosial para birokrat, yakni semacam people power untuk 'melawan' siapa saja, termasuk pimpinan, yang melakukan tindakan menyimpang. Pengembangan budaya ini tentu saja perlu melibatkan peran para tokoh-tokoh informal di organisasi, yang biasanya bukan pimpinan tetapi disegani oleh para birokrat.

Bentuk-bentuk simbol budaya yang dapat dikembangkan misalnya, aktivasi nilai yang telah menjadi diskursus di masyarakat lokal tentang integritas dan profesionalitas. Di Jawa, misalnya, diskursus becik ketitik ala ketara, sepi ing pamrih rame ing gawe, dan juga ora ngoyo, perlu

dibangun dan dikomunikasikan ke dalam interaksi komunikasi sehari-hari. Bahkan, jika perlu digaungkan sebuah slogan yang bersifat mengingatkan pimpinan agar selalu menjaga integritasnya. Misalnya sebuah slogan yang berbunyi, "Kami bangga jika pimpinan kami tidak korupsi". Slogan tersebut dapat dipampang di lobi utama kantor dan juga di pintu masuk ruang pimpinan. Terkadang tidak mudah hanya untuk memasang slogan tersebut, karena dikhawatirkan pimpinan akan merasa tersinggung dan seolah tidak dipercaya. Namun, hal itu dapat ditempuh dengan cara menjelaskan kepada pimpinan secara elegan yang dilakukan oleh para tokoh informal institusi yang mengatasnamakan seluruh anggota institusi.

Jika cara tersebut dapat dilakukan, sebuah institusi akan membuktikan dirinya bahwa budaya antikorupsi tidak hanya bersifat tertutup dan eliteis. Dengan demikian, budaya antikorupsi dapat berkembang nyaman dan alami, karena tidak eliteis dan lebih demokratis. Slogan 'Berani Jujur Hebat!' mungkin lambat laun akan berganti menjadi 'Kami Tidak Takut Untuk Jujur!'





# #10 Year Challenge





0225 ··

# CERMAT SIKAPI HOAKS

Beberapa bulan terakhir, KPK 'diserbu' berita hoaks. Mulai dari isu kelompok Taliban, bisnis di dalam KPK, hingga membiayai LSM dan demonstrasi mahasiswa. Mari kita kenali medium yang digunakan untuk menyebarkan hoaks serta bagaimana cara kita menyikapinya.

- NARASI
  biasanya digunakan untuk menggambarkan runtutan peristiwa seperti seolah-olah benar adanya
- GAMBAR/ FOTO
  biasanya digunakan untuk menambah keyakinan
  pada pembaca akan berita
  bohong yang dibuat
- VIDEO
  biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi
  secara lebih nyata
- MEME
  biasanya digunakan untuk
  menggambarkan sesuatu
  yang tidak sesuai dengan
  kenyataannya, tetapi bersifat humor, lucu

MEDIA
MASSA
biasanya digunakan sebagai
alat atau sarana
untuk menyebarkan hoaks
kepada khalayak
secara serantak



# Untuk membendung hoaks tentang KPK kita bisa melakukan beberapa hal:

- Cek kebenaran informasi melalui kontak layanan informasi KPK di nomor telepon 198 atau melalui email
- Melaporkan akun media sosial yang menyebarkan informasi hoaks pada fitur report yang tersedia pada masing-masing platform media sosial.
- Akun media sosial resmi KPK bisa dijadikan rujukan; Twitter @KPK\_RI dan Instagram @official.kpk
- Tidak menyebarluaskan informasi hoaks tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dulu. Ingat, kita bisa dituntut penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar\*

**Hoaks dalam KBBI:** berita bohong: mereka mengumpulkan -- yang lalu lalang di banyak milis.

(\*) Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Tindak pidana ITE dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1. Kesalahan: dengan sengaja;
- 2. Melawan hukum: tanpa hak;
- 3. Perbuatan: menyebarkan;
- 4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
- Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 6. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian.
- Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya (Adami Chazawi, 2015: 131).

KILAS

### Tertibkan Pajak Mobil Mewah, PBB dan Restauran



Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, KPK mendampingi Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta dan UP PKB-BBNKB (Samsat) Jakarta Utara dalam menertibkan pajak pada Kamis (5/12) di bilangan Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan itu bertujuan menagih pajak secara langsung dengan menempelkan stiker pada tiga jenis objek pajak yang belum melunasi kewajibannya, yaitu kendaraan bermotor, PBB, dan restoran.

# **KPK Peringati Hari Antikorupsi Sedunia 2019**



KPK mengajak segenap pemangku kepentingan dan masyarakat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dengan tema "Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju", Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. "Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progres dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama," katanya. •

### LELUCON KORUPTOR YANG TAK BENAR-BENAR LUCU

Buku "Lelucon Para Koruptor" ini ditulis oleh Agus Noor, seorang sastrawan asal Jawa Tengah yang lahir pada 26 Juni 1968. Ia memiliki latar pendidikan jurusan Teater di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Dia dikenal luas sebagai seorang cerpenis, penyair, esais, serta penulis skenario televisi dan naskah lakon (monolog dan teater) dengan gaya parodi dan satir.

Kali ini Agus menghadirkan sebuah buku yang mengangkat tema tentang politik, khususnya koruptor. Di dalam buku ini ada 12 judul cerita pendek. Diawali dengan

cerita yang berjudul "Saksi Mata", mengisahkan tentang seekor anjing buta yang menjadi saksi mata tunggal atas terbunuhnya Jenderal Ortega Galgado.

Seorang Jenderal Besar dengan sederet bintang penghargaan tiba-tiba ditemukan tewas secara tragis. Jenderal itu juga dicurigai tersandung skandal korupsi, agar mene-

kan kecurigaan yang semakin menjadi-jadi, maka hakim menggelar sidang terbuka dengan memanggil saksi mata, yaitu seekor anjing yang buta. Di dalam cerita ini banyak bagian-bagian yang menggeliteik pembaca. Kebodohan-kebodohan yang dibuat seakanakan menyindir bagaimana hukum di negeri kita berjalan.

Jika di cerpen pertama unsur politik dan hukumnya sangat kental, maka sedikit berbeda dengan cerpen yang kedua. Cerpen yang berjudul "Mati Sunyi Seorang Penyair" ini berisi tentang kehidupan seorang penyair yang tidak bisa menulis satu kata pun. Karena penyair tersebut merasa tidak bisa menulis karena kehilangan satu kata yang sangat penting.

Kata tersebut dicarinya ke mana-mana dan tak kunjung menemukannya. Ia terus mencari hingga ajal menjemputnya. Akhirnya, ia menjadi hantu dan bergentayangan, barulah ia menemukan sebuah kata yang telah lama hilang yaitu "Jujur".

Lembaga pemberantasan korupsi juga telah menganggap ia sebagai *justice collabo-rator* yang baik. Tidak sampai di situ, pejabat itu diberi penghargaan sebagai Pejuang Anti-korupsi dan diberikan keringanan hukuman secara bertahap dengan memberi grasi setahun sepuluh kali. Cerita ini sangat berkesan karena dekat dengan kejadian nyata yang sering terjadi di dalam dunia politik.

Bahkan hampir setiap hari terdengar

berita-berita seperti yang telah dikisahkan di judul ini.

Begitu pula dengan judul-judul lainnya seperti Kisah Tiga Anjing, Perihal Orang Miskin yang Bahagia dan lain-lain. Pun juga cerita utama yang menjadi judul buku ini yaitu Lelucon Para Koruptor. Kumpulan cerita ini kebanyakan me-

ngandung kritikan maupun sindiran tentang dunia politik dan hukum yang terjadi di sepanjang akhir 2016 hingga 2017. •



Penulis:

Agus Noor
Penerbit:

DIVA PRESS
Tahun Terbit:

2017
Kolasi:
272 halaman
Bahasa:
INDONESIA
Genre:
FIKSI



### MERAWAT KEJUJURAN

Poniman (30 tahun), seorang warga yang bertugas ronda pada sebuah malam di desanya. Ia juga bertugas mengumpulkan *Jimpitan* (iuran beras) yang dikumpulkannya dari rumah-rumah warga. Ia berkeliling mengumpulkan segenggam demi segenggam beras dari rumah penduduk.

Pagi harinya, ia terkejut mendapati sang anak, Septu (10 tahun) sarapan bubur ayam. Tak seperti biasanya, keluarga itu hanya makan singkong rebus. Jadi sarapan bubur adalah hal yang istimewa.

Namun, betapa terkejutnya Poniman bahwa bubur yang dimasak sang istri, Juminten (25 tahun), justru berasal dari beras *Jimpitan* yang akan disetorkan Pak RT untuk digunakan sebagai konsumsi warga pada kegiatan gotong-royong.

Sang istri mengira, beras yang dimasak itu merupakan hasil dari penjualan singkong yang dipanen sehari sebelumnya.

"Waduh dik, mati aku. Ini beras jimpitan. Mau aku setorkan nanti," kata Poniman panik.

Bisa dibayangkan adegan berikutnya. Poniman berjuang sekuat tenaga untuk mengganti beras tersebut. Caranya, ia jual



terlebih dahulu singkong untuk kemudian dibelikan beras. Dalam perjalan pulang menuju kediaman Pak RT, tanpa ia ketahui kantung beras yang ditaruhnya pada bocengan sepedanya, terjatuh.

Lalu bagaimakah kelanjutan cerita Poniman? Apakah ia berhasil mengembalikan beras tersebut?

Jimpitan merupakan salah satu karya finalis Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2018, yang menggeliteik kejujuran kita di masyarakat. Poniman saja yang merupakan petani miskin mewakili rakyat kecil punya tekad kuat untuk mempertahankan kejujuran dalam dirinya. Bagaimana masyarakat kelas menengah yang lebih terdidik dengan status sosial dan ekonomi yang lebih baik, menjaga dan merawat kejujurannya? •



# **Anti-Corruption Learning Center**

Corruption Eradication Commission of Indonesia



Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center) Komisi Pemberantasan Korupsi

Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 DKI Jakarta Indonesia

Tel.: +62 21 2550 8300 e-mail: informasi@kpk.go.id Web.: http://www.aclc.kpk.go.id

# TEMUKAN

### Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas

https://jurnal.kpk.go.id



FLIR BRUKAN, BYRTS STUNBERS

DESIGNATION WHITEH

WEST THERE IST

Pendanaan Kampunyo Pemilu Senntak 2019 di Indonesia Penguatan Demokrani Patronasi

